



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II**



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja organisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025, termasuk permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025 secara transparan dan akuntabel. Ke depan, diharapkan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II dapat terus ditingkatkan melalui perbaikan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkelanjutan.

Manokwari, 26 Januari 2026
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

Ir. P. M. Desyarmeda Killian, S.T., M.Si.
NIP. 197912272006052001

EXECUTIVE SUMMARY

A. Tujuan dan Sasaran

BP3KP Papua II bertujuan mendukung pencapaian penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan program perumahan, peningkatan kualitas hunian, serta pengembangan kawasan permukiman sesuai Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Sasaran kinerja diarahkan pada terpenuhinya target pembangunan fisik, kualitas tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

B. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tantangan geografis dan keterbatasan aksesibilitas wilayah, serta kebutuhan penyesuaian terhadap dinamika regulasi dan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, masih diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam rangka menjamin keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program. Di beberapa wilayah, kondisi keamanan yang dipengaruhi oleh konflik sosial dan aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turut menjadi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya dalam hal mobilisasi sumber daya, pengawasan lapangan, dan keberlanjutan pelaksanaan pekerjaan.

C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025 dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Aksi Kinerja. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian indikator telah terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan, sementara sebagian lainnya belum mencapai target optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, keterbatasan sumber daya, kendala teknis dan geografis di lapangan, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan. Meskipun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi, khususnya dalam mendukung penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman. Hasil pengukuran kinerja ini menjadi dasar

evaluasi bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan program serta perbaikan perencanaan dan pengendalian kinerja pada periode selanjutnya.

D. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, pengelolaan anggaran BP3KP Papua II dilaksanakan berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan dalam DIPA masing-masing unit. Untuk BP3KP Papua II, target anggaran ditetapkan sesuai DIPA Tahun 2025, dengan realisasi anggaran yang mencapai Rp. 3.536.660.323,- dari target Rp. 3.947.528.000,- hingga akhir tahun anggaran. Sementara itu, pada Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat, target anggaran telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp. 91.393.598.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 86.275.829.022,-. Apabila anggaran pengadaan meubelair tidak diperhitungkan, maka target anggaran menjadi sebesar Rp. 87.345.033.000,- dengan realisasi tetap sebesar Rp. 86.275.829.022,-. Kondisi tersebut disebabkan oleh kegiatan pengadaan meubelair yang telah dilaksanakan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu Tahun Anggaran 2024. Meskipun demikian, seluruh pelaksanaan dan realisasi anggaran pada Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi.....	2
I.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
I.4 Sarana dan Prasarana	7
I.5 Isu Strategis	28
I.6 Sistematika Laporan	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	31
II.1 Rencana Strategis.....	31
II.2 Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	45
II.3 Metode Pengukuran Kinerja	49
II.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	62
III.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	62
III.2 Capaian Kinerja.....	64
III.3 Analisis Perbandingan Kinerja	66
III.4 Analisis Realisasi Anggaran.....	72
III.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
III.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja	85
III.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan.....	86
BAB IV PENUTUP	98
IV.1 Kesimpulan	98
IV.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	99
LAMPIRAN.....	101
Lampiran 1. Dokumentasi	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai Pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025	3
Tabel 2. Data Pegawai Pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025.....	5
Tabel 3. Rekap Aset Aktif di Satker BP3KP Papua II sampai Tahun 2025.....	8
Tabel 4. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2016	9
Tabel 5. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2017	12
Tabel 6. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2018	12
Tabel 7. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2020	12
Tabel 8. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2021	13
Tabel 9. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2022	13
Tabel 10. Daftar Aset Rumah Khusus BP3KP Papua II Tahun 2016 – 2025	15
Tabel 11. Daftar Aset Rumah Susun Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2025.....	21
Tabel 12. Daftar Aset PSU Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2025...	24
Tabel 13. Regulasi Undang-Undang	37
Tabel 14. Regulasi Peraturan Pemerintah.....	38
Tabel 15. Regulasi Peraturan Presiden.....	39
Tabel 16. Regulasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	39
Tabel 17. Regulasi SE Direktur Jenderal TKPR.....	40
Tabel 18. Regulasi Keputusan Menteri PKP	41
Tabel 19. Skenario Target Kinerja Setiap DIPA BP3KP Papua II	42
Tabel 20. Skenario Kerangka Pendanaan Setiap DIPA	44
Tabel 21. Skala Pengukuran Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025	49
Tabel 22. DIPA Sekretariat Jenderal Satker BP3KP Papua II Tahun 2025	50
Tabel 23. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker BP3KP Papua II Tahun 2025	51
Tabel 24. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker BP3KP Papua II Tahun 2025	51
Tabel 25. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker BP3KP Papua II Tahun 2025	52
Tabel 26. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker BP3KP Papua II Tahun 2025	53

Tabel 27. DIPA Awal Sekretariat Jenderal – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	53
Tabel 28. DIPA Revisi 1 Sekretariat Jenderal – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	54
Tabel 29. DIPA Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	55
Tabel 30. DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	56
Tabel 31. DIPA Revisi 2 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	57
Tabel 32. Perbandingan Perubahan KPA pada DIPA Revisi 2 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	58
Tabel 33. DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	58
Tabel 34. DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	59
Tabel 35. DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	60
Tabel 36. DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	60
Tabel 37. Perbandingan Perubahan KPA pada DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	61
Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025	65
Tabel 39. Perbandingan Capaian Kinerja Satker BP3KP Papua II Tahun 2024 dan 2025	67
Tabel 40. Perbandingan Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dan 2025	69
Tabel 41. Perbandingan Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dan 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung)	70
Tabel 42. Capaian Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	72
Tabel 43. Capaian Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	75
Tabel 44. Capaian Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung)	76
Tabel 45. Capaian Target Kinerja Satker BP3KP Papua II berdasarkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	79
Tabel 46. Capaian Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat berdasarkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	81

Tabel 47. Capaian Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat berdasarkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung)	82
Tabel 48. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia.....	84
Tabel 49. Perbandingan Target dan Realisasi Program Dukungan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025.....	87
Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Program Klinik PKP	89
Tabel 51. Profil Program Rumah Susun BP3KP Papua II Tahun 2025.....	90
Tabel 52. Perbandingan Target dan Realisasi Program Rumah Susun dan Rumah Khusus.....	91
Tabel 53. Perbandingan Target dan Realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	93
Tabel 54. Perbandingan Target dan Realisasi Program Bantuan Pembangunan PSU Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025	3
Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pegawai Satker BP3KP Papua II dan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	7
Gambar 3. Perbandingan Jumlah Pegawai Satker BP3KP Papua II dan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian	7
Gambar 4. Diagram SOTK UPT di Kementerian PKP	41
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Papua II DIPA Sekretariat Jenderal	46
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Papua II DIPA Sekretariat Jenderal.....	46
Gambar 7. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	46
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	47
Gambar 9. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	47
Gambar 10. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	47
Gambar 11. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	48
Gambar 12. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	48
Gambar 13. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	48
Gambar 14. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	49
Gambar 15. Rencana Strategis BP3KP Papua II Tahun 2025-2029	63
Gambar 16. Rencana Aksi BP3KP Papua II Tahun 2025	63
Gambar 17. Laporan Triwulan dan Laporan AKIP BP3KP Papua II Tahun 2025	64
Gambar 18. Kurva S Keuangan Satker BP3KP Papua II Tahun 2025.....	73
Gambar 19. Kurva S Fisik Satker BP3KP Papua II Tahun 2025.....	74
Gambar 20. Kurva S Keuangan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025	75
Gambar 21. Kurva S Fisik Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025.....	76
Gambar 22. Kurva S Keuangan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung)	77

Gambar 23. Kurva S Fisik Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung)	78
Gambar 24. Dokumentasi Penyelenggaraan Klinik PKP Tahun 2025	88
Gambar 25. Profil Pembangunan Rumah Susun Tahun 2025	89
Gambar 26. Sebaran Lokasi BSPS Tahun 2025	92
Gambar 27. Profil Kegiatan Bantuan Pembangunan PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Fajar Sowi Damai.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Papua II. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Rencana Strategis BP3KP Papua II Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi mengenai realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2025, sekaligus menggambarkan tingkat keberhasilan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap entitas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian, unit organisasi, satuan kerja, hingga unit pelaksana teknis wajib menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang. Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan untuk mendukung penyusunan Laporan Kinerja yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penyelenggaraan SAKIP meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis dan/atau Dokumen Perencanaan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pengelolaan Data Kinerja;
5. Pelaporan Kinerja; dan
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025 mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

I.2 Tugas dan Fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada Permen PKP No. 1 Tahun 2025, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan pascakerusuhan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan.
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;

NO	NAMA	NIP/ NIPPPK/ KTP	JABATAN
PNS			
1	Ir. P. M. Desyarmada Killian, S.T., M.Si.	197912272006052001	Kepala Balai
2	Markus Desla, S.Kom.	198712312014121001	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha/ PPK BP3KP Papua II
3	Ahmad Rithauddin Abbas, S.T.	198004052010041001	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I
4	Second M. S. Maria E. Worabai, S.T.	199211302019032007	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II
5	Trifosa Marpaung, S.T.	198710302014121001	PPSPM Satker / Bendahara Pengeluaran BP3KP Papua II
6	Amus Yanto Ijie, S.T.	198101082008011009	Staf Pengelola
7	Fitria Sekarsari, S.E.	200201172025062010	Ahli Pertama - Analis Pengelola Keuangan APBN
8	Iklil Lutfiyah Kamila, S.T.	199910312025062016	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
9	Kevin Yoga Pratama Purba, S.T.	200009282025061008	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan
10	Mohammad Indra Kurniawan, S.T.	200209252025061004	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
11	Muhammad Yusran, S.T.	199811162025061011	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
12	Trixi Premier Sanativa, S.E.	200110182025062018	Ahli Pertama - Analis Pengelola Keuangan APBN
13	Yolda Juliandri Patasik, S.E.	200107202025062014	Ahli Pertama - Analis Pengelola Keuangan APBN
PPPK			
1	Adrian Yudhantoro, S.T.	199312042024211013	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan
2	Andarias A. Boseran, S.P.	198708112025211050	Penata Operasional Layanan
3	Dance Christian Nepa Bureni, S.E.	197912282025211019	Penata Operasional Layanan
4	Devi Setyaningtyas Rompas, S.Sos.	198004122023212018	Arsiparis
5	Leonora O. Mambrasar, S.I.P.	197912272025212031	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
6	Natalia Howay, S.E.	199212242025212061	Penata Operasional Layanan
7	Ruben Ruamba, S.T.	197807242025211020	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
8	Yuliana Thinike Koirewoa	198808122025212065	Operator Layanan Operasional

NO	NAMA	NIP/ NIPPPK/ KTP	JABATAN
9	Agustinus Mauw	197808272025211039	Pengelola Operasional Umum
10	Syarif Hamdani	197912312025211084	Operator Operasional Layanan
11	Bert Erwin Sembor, S.T.	199601272024211008	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan
12	Sugeng Hariyadi, S.T.	198406202023211017	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
13	Dwi Agus Setiawan, A.Md.	199108122024211007	Trampil - Pranata Komputer
14	Riston Batti, S.T.	198108252024211003	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
OUTSOURCING			
1	Muhammad Fachrul Bachmid, S.T.		Pengemudi
2	Imanuel Raubaba		Petugas Keamanan
3	Dolfince Watofa		Pramubakti

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Papua II Tahun 2025

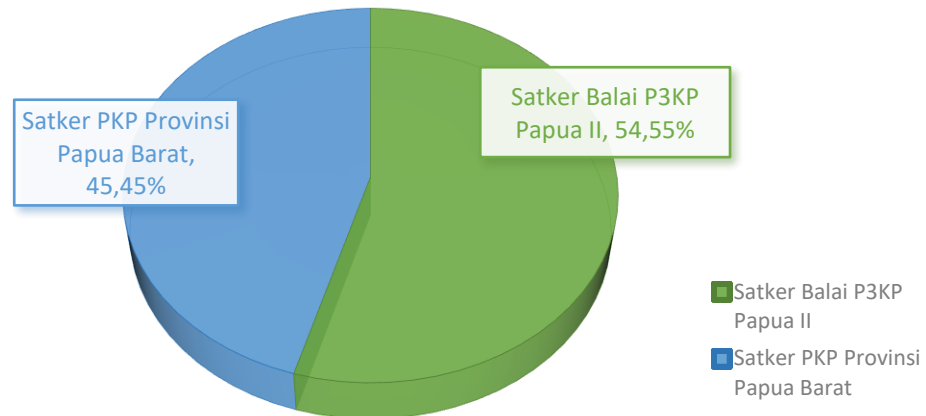
Tabel 2. Data Pegawai Pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025

NO	NAMA	NIP/ NIPPPK/ KTP	JABATAN
PNS			
1	Ferry Moya, S.T.	198210292014121001	Kepala Satuan Kerja
2	Heri Andoni, S.T., M.Ars.	199301222020121004	PPK Rumah Susun dan Khusus
3	Febri Nur Fitrianto, S.Ars.	199702092020121005	PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman
4	Enggelina Snanfi, S.T.	198103012014122001	PPSPM Balai / Bendahara Pengeluaran Satker PKP Papua Barat
5	Andi Muhammad Rijal, S.Ars.	199803012025061009	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
6	Aprilian Rante Palalangan, S.T.	200004262025062006	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
7	Asriel Tonglo Bulawan, S.T.	199706012025061018	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan
8	Erens Randy Sapulette, S.T.	200109262025061006	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan

NO	NAMA	NIP/ NIPPPK/ KTP	JABATAN
9	Fidelia Alif Ramadhani Katjong, S.P.W.K.	199812292025062014	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
10	Mecris Mides Yumame, S.T.	199812202025062007	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan
11	Olivia Tiya Permata, S.E.	200007202025062017	Ahli Pertama - Analis Pengelola Keuangan APBN
12	Yanto D. Sigalingging, S.A.P.	199301232025061007	Ahli Pertama - Arsiparis
PPPK			
1	Daniel Dany, S.T.	198306102025211051	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
2	Obet Yohan M. Kmur, S.T.	198207182025211045	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
3	Rahmad Hidayat Killian, S.T.	199002192025211062	Penata Layanan Operasional
4	Rahmawati Wahid, S.E.	199102102023212043	Ahli Pertama - Arsiparis
5	Sitti Mardiah Rahakbauw, A.Md.	198910162025212046	Pengelola Layanan Operasional
6	Sugiarto Massolo, S.T.	199710062024211004	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan
7	Ray Damai Samuel Siregar, S.T.	199505092023211019	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
8	Ririn Engie Valista Sembiring, S.Ars.	199405192023212047	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
9	Anggita Moro Gumilang, S.T.	199412182024212012	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
10	Rino Razali	198603192025211042	Operator Layanan Operasional
TENAGA AHLI			
1	Mirdan Umbu, S.T.		Tenaga Ahli Konstruksi
2	Budiono, S.E.		Tenaga Ahli Pemberdayaan

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Papua II Tahun 2025

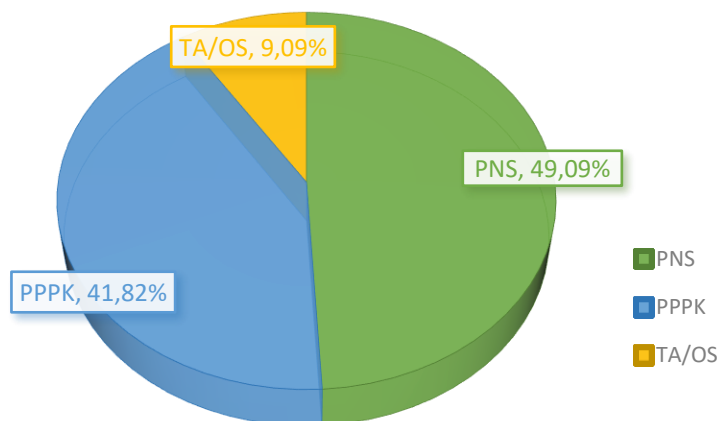
PERBANDINGAN JUMLAH PEGAWAI SATKER BP3KP PAPUA II DAN SATKER PKP PROVINSI PAPUA BARAT



Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pegawai Satker BP3KP Papua II dan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Papua II Tahun 2025

JUMLAH SDM BERDASARKAN STATUS PNS/ PPPK/ KI



Gambar 3. Perbandingan Jumlah Pegawai Satker BP3KP Papua II dan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Papua II Tahun 2025

I.4 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, BP3KP Papua II didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, baik berupa fasilitas fisik maupun teknologi informasi, yang digunakan dalam menunjang

pelaksanaan kegiatan. Rincian sarana dan prasarana dimaksud disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekap Aset Aktif di Satker BP3KP Papua II sampai Tahun 2025

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah Barang		Kondisi
				Jumlah	Satuan	
1	Laptop	2021	ASUS ROG STRIX	2	Unit	Baik
2	Pc Unit	2021	ASPIRE C22-963 ALL IN	1	Unit	Baik
3	Kursi Besi/Metal	2021	KURSI HADAP INDACHI	7	Unit	Baik
4	Meja Kerja Kayu	2021	MEJA VINO MT-120	7	Unit	Baik
5	Laptop	2021	MSI MODERN 14 B10MW	1	Unit	Baik
6	Drone	2021	DRONE MAVIC AIR 2 COMBO	1	Unit	Baik
7	Microphone/ Wireless Mic	2022	SARAMONIC BLINK 500 B2	1	Unit	Baik
8	Kamera Digital	2022	SONY ALPA 6000	1	Unit	Baik
9	Drone	2022	DRONE DJI MINI FLY MORE COMBO	1	Unit	Baik
10	Laptop	2022	ASUS ZENBOOK UX5401E + OS WINDOWS	3	Unit	Baik
11	Laptop	2022	DELL PRECISION 5570-002	2	Unit	Baik
12	Loudspeaker	2023	SPEAKER PORTABLE JBL PARTYBOX 310	1	Unit	Baik
13	Video Conference	2023	VIDEO CONFERENCING SYSTEM + MIC + TRIPOD KAMERA (PAKET LENGKAP) LOGITECH	1	Unit	Baik
14	Laptop	2023	LAPTOP TKDN ACER TRAVELMATE P214 (TMP214) CORE i5 RAM 8 GB SSD 512 GB	5	Unit	Baik
15	<i>Distance Meter Electronic</i>	2023	METERAN LASER	1	Unit	Baik
16	Alat Pemeriksa Beton	2023	ALAT UJI BETON DIGITAL	1	Unit	Baik
17	Meja Kerja Besi /Metal	2023	MEJA FOLDING	25	Unit	Baik
18	LCD Projector / Infocus	2023	PROJEKTOR LASER HOME THEATRE	1	Unit	Baik
19	Kursi Besi / Metal	2023	KURSI KERJA PEGAWAI	25	Unit	Baik
20	Lemari Besi / Metal	2023	DRY BOX CABINET	1	Unit	Baik

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah Barang		Kondisi
				Jumlah	Satuan	
21	Lemari Besi / Metal	2023	LOKER 1 PINTU	50	Unit	Baik
22	Software	2023	Cobisot TRB C-V	1	Unit	Baik
23	Sofa	2024	MANGGO 211	1	Unit	Baik
24	LCD Projector / Infocus	2024	OPTOMA	1	Unit	Baik
25	Printer Epson L3210 All In One	2024	EPSON L3210	9	Unit	Baik
26	Scanner Dokumen Tkdn	2024	WORKVORCE DS-1630	2	Unit	Baik
27	Laptop	2024	ASUS TKDN B1402CBA INTEL COR C RAM i5 8 GB SSD 215 GB	2	Unit	Baik
28	Printer Hp Office Jet Mibile Portable 200 Print Wireless Wifi	2024	HP OFFICE JET MIBILE PORTABLE 200 PRIN	2	Unit	Baik

Tabel 4. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2016

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
1	A.C. Split	Panasonic 1/2 PK	BAIK
2	A.C. Split	Panasonic 1/2 PK	BAIK
3	A.C. Split	Panasonic 1/2 PK	BAIK
4	A.C. Split	Panasonic 1 PK	BAIK
5	A.C. Split	Panasonic 1/2 PK	BAIK
6	A.C. Split	Panasonic 1/2 PK	BAIK
7	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
8	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
9	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
10	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
11	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
12	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
13	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
14	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
15	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
16	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
17	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK
18	Meja Kerja Kayu	Active Furniture	BAIK

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
19	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu 1/2 Biro	BAIK
20	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu 1/2 Biro	BAIK
21	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu 1/2 Biro	BAIK
22	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu 1/2 Biro	BAIK
23	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu 1 Biro	BAIK
24	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu 1 Biro	BAIK
25	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Oval + Drawer	BAIK
26	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu 1 Biro	BAIK
27	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu 1/2 Biro	BAIK
28	Lemari Kayu	Aktiv Furniture	BAIK
29	Lemari Kayu	Aktiv Furniture	BAIK
30	Lemari Kayu	Aktiv Furniture	BAIK
31	Lemari Kayu	Lemari Arsip	BAIK
32	Lemari Kayu	Lemari Arsip	BAIK
33	Brandkas	Brandkas	BAIK
34	P.C Unit	Lenovo	BAIK
35	P.C Unit	Lenovo	BAIK
36	P.C Unit	Lenovo	BAIK
37	P.C Unit	Lenovo	BAIK
38	P.C Unit	Lenovo	BAIK
39	LCD Projector/Infocus	LCD Projector	BAIK
40	Camera Digital	Kamera Canon DSLR	BAIK
41	Camera Digital	Kamera Canon DSLR	BAIK
42	Camera Digital	Kamera Canon DSLR	BAIK
43	GPS Receiver	Global Positioning	BAIK
44	GPS Receiver	Global Positioning	BAIK
45	GPS Receiver	Global Positioning	BAIK
46	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L220 Color	BAIK
47	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L220 Color	BAIK
48	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L220 Color	BAIK
49	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L220 Color	BAIK
50	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L220 Color	BAIK
51	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L220 Color	BAIK
52	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L220 Color	BAIK
53	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L220 Color	BAIK

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
54	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L220 Color	BAIK
55	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L220 Color	BAIK
56	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L565 Color	BAIK
57	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L565 Color	BAIK
58	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L360	BAIK
59	Printer (Peralatan Personl Komputer)	Printer Epson L120	BAIK
60	Laptop	Laptop Lenovo Core i5	BAIK
61	Laptop	Laptop Lenovo Core i5	BAIK
62	Laptop	Laptop Lenovo Core i5	BAIK
63	Laptop	Laptop Lenovo Core i5	BAIK
64	Laptop	Laptop Lenovo Core i5	BAIK
65	Laptop	Laptop Lenovo Core i5	BAIK
66	Laptop	Laptop Lenovo Core i5	BAIK
67	Laptop	Laptop Lenovo Core i5	BAIK
68	Laptop	Laptop Lenovo Core i5	BAIK
69	Laptop	Laptop Lenovo Core i5	BAIK
70	Meja Komputer	Meja Komputer Kecil	BAIK
71	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
72	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
73	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
74	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
75	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
76	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
77	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
78	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
79	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
80	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
81	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
82	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
83	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
84	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
85	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
86	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
87	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
88	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
89	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
90	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
91	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
92	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
93	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
94	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
95	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
96	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
97	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
98	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
99	Kursi Besi / Metal	Kursi Prince Biru	BAIK
100	Kursi Besi / Metal	Kursi Jaring	BAIK
101	Kursi Besi / Metal	Kursi Direktris	BAIK
102	Kursi Besi / Metal	Kursi Direktris	BAIK
103	Kursi Besi / Metal	Kursi Direktris	BAIK
104	Kursi Besi / Metal	Kursi Direktris	BAIK
105	Bangku Panjang Besi / Metal	Sofa + Meja 1 Set	BAIK

Tabel 5. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2017

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
1	Drone	DJI Mavic Pro Combo	BAIK
2	Drone	DJI Phantom 4 Pro	BAIK

Tabel 6. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2018

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
1	Laptop	MSIGS63	BAIK
2	Laptop	MSIGE63 VR	BAIK
3	Laptop	HP 14 - BS 723TU	BAIK

Tabel 7. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2020

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
1	P.C Unit	Lenovo All In One	BAIK
2	P.C Unit	Hp All In One	BAIK
3	Laptop	Lenovo	BAIK
4	Lemari Besi/Metal	Frontline	BAIK
5	Lemari Besi/Metal	Frontline	BAIK

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
6	Lemari Besi/Metal	Frontline	BAIK
7	Lcd Monitor	LED LG 65UM7300+ Standing Bracket Tv	BAIK
8	Meja Kerja Kayu	Activ Furniture	BAIK
9	Meja Kerja Kayu	Activ Furniture	BAIK
10	Meja Kerja Kayu	Activ Furniture	BAIK
11	Kursi Besi/Metal	Kursi Besi/Metal	BAIK
12	Kursi Besi/Metal	Kursi Besi/Metal	BAIK
13	Kursi Besi/Metal	Kursi Besi/Metal	BAIK
14	Bangku Panjang Kayu	Sofa Casarini Paris	BAIK
15	Camera Vidio	Webcam Nemesis NYK A90	BAIK
16	Amplifier	Ampli Bmb	BAIK
17	Mic Conference	1 Set Mic Wireless Avino + Stand Mic	BAIK
18	Sound System	Bmb	BAIK

Tabel 8. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2021

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
1	Laptop	Asus Zenbook UX425EA IPS751	BAIK
2	Laptop	Lenovo Yoga 6 13 2in1 Touch	BAIK
3	Laptop	MYD921D Apple Macbook Pro 2020	BAIK
4	Laptop	HP Envy 13 Intel Core I5	BAIK
5	LCD Projector / Infocus	Projector Laser Maxell MP-JW351E	BAIK
6	Kursi Besi / Metal	Kursi Hidrolik Levante 28	BAIK
7	Kursi Besi / Metal	Kursi Hidrolik Levante 28	BAIK
8	Kursi Besi / Metal	Kursi Hidrolik Levante 28	BAIK
9	Kursi Besi / Metal	Kursi Hidrolik Levante 28	BAIK
10	Kursi Besi / Metal	Kursi Hidrolik Levante 28	BAIK
11	Kursi Besi / Metal	Kursi Hidrolik Levante 28	BAIK
12	Kursi Besi / Metal	Kursi Hidrolik Levante 28	BAIK
13	Kursi Besi / Metal	Kursi Hidrolik Levante 28	BAIK

Tabel 9. Rekap Aset Aktif di Satker PKP Papua Barat Tahun 2022

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
1	Laptop	ACER Nitro AN515-58-91TA-I9-12900H/16GB/512GB/ RTX3060/ 15.6"	BAIK

No	Jenis Barang	Merk / Type	Keterangan
2	Laptop	Acer Helios 300 PH315-54-712C 17 11800H 16GB 512SSD FTX3070 8GB 16.6"	BAIK
3	Laptop	Notebook Acer Nitro 5 AN515 (19,16,512,3060, W11+O)	BAIK
4	Laptop	MSI Stealth GS66 12UHS/ Core I9 - 12900H / 32GB/ 2TBSSD/VGA/ 16GB/ 15.6"	BAIK
5	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Scanner Epson Work Force DS - 410	BAIK
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Epson L3210 (KK BC) XAGK4544416	BAIK

Selain daftar sarana dan prasarana, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II juga memiliki daftar aset yang tercatat dan dikelola selama Tahun 2016–2025, sebagaimana disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Daftar Aset Rumah Khusus BP3KP Papua II Tahun 2016 – 2025

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
A. HIBAH RUMAH KHUSUS								
1	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat I (SNVT-RUSUS 16-97)	Kabupaten Teluk Wondama, Distrik Wasior, Kampung Sanduay	Aset Lain - Lain (Simak)	2016	100	18.907.347.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 469/BA/Dr/2021 Tanggal 08 Juni 2021 SK Penghapusan Nomor 11/KPTS/401688/2021 Tanggal 09 September 2021
2	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat II (SNVT-RUSUS 16-98)	Kabupaten Maybrat, Distrik Aifat Timur, Kampung Sorin, Kamat, Asen, dan Ayawata	Aset Lain - Lain (Simak)	2016	55	13.692.815.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 48/BA/Dr/2022 Tanggal 21 Januari 2022 SK Penghapusan Nomor 20/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 19 April 2022
3	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat III (SNVT-RUSUS 16-99)	Kabupaten Maybrat, Distrik Ayamaru Utara Jaya, Kampung Kona, Serma, Suwiam, dan Nawita.	Aset Lain - Lain (Simak)	2016	48	11.841.891.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 48/BA/Dr/2022 Tanggal 21/01/2022 SK Penghapusan Nomor 20/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 19/04/2022
4	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat IV (SNVT-RUSUS 16-100)	Kabupaten Kaimana, Distrik Kaimana, Kota Kaimana dan Sisir I, serta Distrik Teluk Arguni Kampung Wetuf dan Degnofa	Persediaan	2016	52	9.395.123.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 908/BA/DR/2022 Tanggal 15 Juli 2022 SK Penghapusan Nomor 34/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 19 Oktober 2022
5	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat V (SNVT-RUSUS 16-101)	Kabupaten Sorong, Distrik Mayamuk, Kampung Warmon Kokoda	Persediaan	2016	55	9.790.592.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 227/BA/Dr/2019 648/1338 Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 26/KPTS/401688/2019 Tanggal 28 November 2019
6	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat VI (SNVT-RUSUS 16-102)	Kabupaten Sorong, Distrik Mayamuk, Kampung Safei dan Kokoda Papan	Persediaan	2016	55	9.039.498.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 227/BA/Dr/2019 648/1338 Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 26/KPTS/401688/2019 Tanggal 28 November 2019

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
7	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat VII (SNVT-RUSUS 16-103)	Kabupaten Tambrauw, Distrik Mubrani, Kampung Arfu	Persediaan	2016	46	9.400.826.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 226/BA/Dr/2019 653/323/2019 Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 20/KPTS/401688/2019 Tanggal 23 Oktober 2019
8	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat VIII (SNVT-RUSUS 16-104)	Kabupaten Teluk Bintuni, Distrik Bintuni, Kampung Kohoin dan Inyesta	Persediaan	2016	35	7.456.710.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 228/BA/Dr/2019 16/10/BUPTB/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 20/KPTS/401688/2019 Tanggal 23 Oktober 2019
9	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat IX (SNVT-RUSUS 16-105)	Kabupaten Tambrauw, Distrik Sausafour, Kampung Nanggaouw	Persediaan	2016	56	9.752.434.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 121/BA/Dr/2020 653/086/2020 Tanggal 28 Juli 2020 SK Penghapusan Nomor 19/KPTS/401688/2020 Tanggal 28 Desember 2020
10	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat X (SNVT-RUSUS 16-106)	Kabupaten Sorong, Distrik Mayamuk, Kampung Kabanmolo	Persediaan	2016	55	9.181.102.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 227/BA/Dr/2019 648/1338 Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 26/KPTS/401688/2019 Tanggal 28 November 2019
11	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat XI (SNVT-RUSUS 16-107)	Kabupaten Raja Ampat, Distrik Teluk Mayalibit, Kampung Warsambin	Persediaan	2016	50	9.649.864.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 229/BA/Dr/2019 682/308/SETDA Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 26/KPTS/401688/2019 Tanggal 28 November 2019
12	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat XII (SNVT-RUSUS 16-108)	Kabupaten Raja Ampat, Distrik Batanta Selatan, Kampung Waiman	Persediaan	2016	50	8.954.914.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 229/BA/Dr/2019 682/308/SETDA Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 26/KPTS/401688/2019 Tanggal 28 November 2019
13	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat XIII (SNVT-RUSUS 16-109)	Kabupaten Teluk Bintuni, Distrik Bintuni, Kampung Tolak	Persediaan	2016	44	9.344.160.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 228/BA/Dr/2019 16/10/BUP-TB/IX/2019 Tanggal 18 September 2019

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
								SK Penghapusan Nomor 20/KPTS/401688/2019 Tanggal 23 Oktober 2019
14	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat XIV (SNVT-RUSUS 16-119)	Kabupaten Manokwari, Distrik Manokwari Barat, Kampung Soribo	Persediaan	2016	25	4.086.949.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 230/BA/Dr/2019 1705 Tanggal 30 April 2019 SK Penghapusan Nomor 26/KPTS/401688/2019 Tanggal 28 November 2019
15	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat I (SNVT-RUSUS17-003)	Kabupaten Raja Ampat, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kampung Waisilip	Persediaan	2017	50	11.357.678.047	Sudah Hibah	Nomor BAST 229/BA/Dr/2019 682/308/SETDA Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 26/KPTS/401688/2019 Tanggal 28 November 2019
16	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat II (SNVT-RUSUS17-004)	Kabupaten Raja Ampat, Distrik Wasai, Wasai	Persediaan	2017	1	740.778.983	Sudah Hibah	Nomor BAST 229/BA/Dr/2019 682/308/SETDA Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 26/KPTS/401688/2019 Tanggal 28 November 2019
17	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat III (SNVT-RUSUS17-005)	Kabupaten Teluk Wondama, Distrik Wondiboy, Kampung Kabouw	Persediaan	2017	50	12.435.460.705	Sudah Hibah	Nomor BAST 469/BA/Dr/2021 Tanggal 08 Juni 2021 SK Penghapusan Nomor 11/KPTS/401688/2021 Tanggal 09 September 2021
18	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat IV (SNVT-RUSUS17-006)	Kabupaten Maybrat, Distrik Aifat Timur, Kampung Aisa	Persediaan	2017	50	11.838.590.855	Sudah Hibah	Nomor BAST 225/BA/Dr/2019 Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 05/KPTS/401688/2021 Tanggal 03 Juni 2021
19	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat V (SNVT-RUSUS17-007)	Kabupaten Pegunungan Arfak, Distrik Sururey, Kampung Kopo	Persediaan	2017	50	14.670.229.295	Sudah Hibah	Nomor BAST 48/BA/Dr/2020 108/BUP-PEGAF/2020 Tanggal 29 Mei 2020 SK Penghapusan Nomor 19/KPTS/401688/2020 Tanggal 28 Desember 2020

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
20	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat VI (SNVT-RUSUS17-008)	Kabupaten Sorong Selatan, Distrik Fkour, Kampung Pasir Putih	Persediaan	2017	50	9.220.177.115	Sudah Hibah	Nomor BAST 196/BA/Dr/2019 645/BSS/2019 Tanggal 18 September 2019 SK Penghapusan Nomor 20/KPTS/401688/2019 Tanggal 23 Oktober 2019
21	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat I (SNVT-RUSUS18-003)	Kabupaten Sorong, Distrik Seget Kampung Malio dan Distrik Mariat Kampung Mare	Persediaan	2018	50	11.442.483.968	Sudah Hibah	Nomor BAST 1525/BA/Dr/2021 Tanggal 01 November 2021 SK Penghapusan Nomor 01.a/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 10 Januari 2022
22	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat II (SNVT-RUSUS18-004)	Kabupaten Teluk Bintuni, Distrik Manimeri, Kampung Korano Jaya	Persediaan	2018	50	11.634.676.465	Sudah Hibah	Nomor BAST 110/BA/Dr/2020 Tanggal 08 Juli 2020 SK Penghapusan Nomor 05/KPTS/401688/2021 Tanggal 03 Juni 2021
23	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat III (SNVT-RUSUS18-005)	Kabupaten Fakfak, Distrik Kayauni, Kampung Kuagas	Persediaan	2018	50	12.888.809.843	Sudah Hibah	Nomor BAST 452/BA/Dr/2022 Tanggal 11 Mei 2021 SK Penghapusan Nomor 33/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 10 Oktober 2021
24	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat IV (SNVT-RUSUS18-006)	Kabupaten Kaimana, Distrik Kaimana, Kampung Kroy	Persediaan	2018	50	12.367.746.189	Sudah Hibah	Nomor BAST 323/BA/Dr/2022 Tanggal 28 Maret 2022 SK Penghapusan Nomor 22/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 20 Mei 2021
25	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat V (SNVT-RUSUS18-007)	Kabupaten Manokwari, Distrik Manokwari Selatan, Kampung Wasay	Persediaan	2018	50	10.693.145.125	Sudah Hibah	Nomor BAST 209/BA/Dr/2020 Tanggal 11 September 2020 SK Penghapusan Nomor 05/KPTS/401688/2021 Tanggal 03 Juni 2021
26	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat VI (SNVT-RUSUS18-017)	Kabupaten Manokwari, Distrik Manokwari Barat, Kampung Soribo	Persediaan	2018	25	5.220.823.410	Sudah Hibah	Nomor BAST 209/BA/Dr/2020 Tanggal 11 September 2020 SK Penghapusan Nomor 05/KPTS/401688/2021 Tanggal 03 Juni 2021

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
27	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat I (PABAR-RUSUS19-02)	Kabupaten Manokwari Selatan, Distrik Ransiki, Kampung Sabri	Persediaan	2019	40	7.542.721.781	Sudah Hibah	Nomor BAST 500/BA/DR/2023 - 419/2023 Tanggal 31 Mei 2023 SK Penghapusan Nomor 15/KPTS/Rb.19.4/2023 Tanggal 05 Juni 2023
28	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat II (PABAR-RUSUS19-03)	Kabupaten Raja Ampat, Distrik Salawati Barat, Kampung Kaliaam	Persediaan	2019	25	5.155.980.035	Sudah Hibah	Nomor BAST 503/BA/DR/2023 - 100.3.7/99/SETDA Tanggal 23 Mei 2023 SK Penghapusan Nomor 13/KPTS/19.4/2023 Tanggal 26 Mei 2023
29	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat V (PABAR-RUSUS19-06)	Kabupaten Pegunungan Arfak, Distrik Anggi Gida, Kampung Sisrang	Persediaan	2019	20	5.363.075.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 501/BA/DR/2023 Tanggal 22 Mei 2023 SK Penghapusan Nomor 11/KPTS/19.4/2023 Tanggal 26 Mei 2023
30	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat VI(PABAR-RUSUS19-07)	Kabupaten Raja Ampat, Distrik Misool Selatan, Kampung Kayerepop	Persediaan	2019	20	4.349.742.628	Sudah Hibah	Nomor BAST 503/BA/DR/2023-100.3.7/99/SETDA Tanggal 23 Mei 2023 SK Penghapusan Nomor 13/KPTS/19.4/2023 Tanggal 26 Mei 2023
31	Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat VII (PABAR-RUSUS19-08)	Kabupaten Raja Ampat, Distrik Misool Selatan, Kampung Kayerepop	Persediaan	2019	20	4.688.260.756	Sudah Hibah	Nomor BAST 503/BA/DR/2023-100.3.7/99/SETDA Tanggal 23 Mei 2023 SK Penghapusan Nomor 13/KPTS/19.4/2023 Tanggal 26 Mei 2023
32	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU di Provinsi Papua Barat Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak	Kabupaten Pegunungan Arfak, Distrik Minyambouw, Kampung Bingoyut	Persediaan	2020	20	5.776.556.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 501/BA/DR/2023 Tanggal 22 Mei 2023 SK Penghapusan Nomor 11/KPTS/19.4/2023 Tanggal 26 Mei 2023

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
33	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU di Provinsi Papua Barat Kampung Fafanlap dan Kampung Harapan Jaya Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten Raja Ampat, Distrik Misool Selatan, Kampung Fafanlap	Persediaan	2020	9	2.390.383.000	Proses Melengkapi Dokumen Eksternal	Nomor BAST 2365/BA/DR/2023 Tanggal 29 Desember 2023 SK Penghapusan Nomor 01/KPTS/Rb.19.4/2024 Tanggal 02 Januari 2024
34	Rusus PEN PKT Kab. Teluk Wondama - PAKET II 2021	Kabupaten Teluk Wondama Distrik Rasiei, Sasirei	Persediaan	2021	30	6.491.616.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 502/BA/DR/2023 Tanggal 25 Mei 2023 SK Penghapusan Nomor 10/KPTS/Rb.19.4/2023 Tanggal 26 Mei 2023
35	Rusus PEN PKT Kab. Tambrau - PAKET III 2021	Kabupaten Tambrau, Distrik Kebar, Kampung Matapun	Persediaan	2021	30	6.697.996.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 504/BA/DR/2023 Tanggal 10 Mei 2023 SK Penghapusan Nomor 12/KPTS/Rb.19.4/2023 Tanggal 26 Mei 2023
36	Rusus Ahli Waris TNI	Kota Sorong dan Kab. Sorong	Persediaan	2021	2	520.015.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 2363/BA/DR/2023 dan 2364/BA/DR/2023 Tanggal 12 Desember 2023 SK Penghapusan Nomor 34/KPTS/Rb.19.4/2023 Tanggal 18 Desember 2023
37	Rusus Sausafor TA. 2022	Kab. Tambrau	Persediaan	2022	30	7.515.650.000	Belum Hibah	MENUNGGU PERSETUJUAN PSP DI KEMENTERIAN PKP DAN PELAKSANAAN BAI
SUB TOTAL - A						321.496.821.200		
B. RUMAH KHUSUS ALIH STATUS								
1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU di Provinsi Papua Barat Koramil Kabupaten Pegunungan Arfak	Kabupaten Pegunungan Arfak, Distrik Anggi, Kampung Ullong	Aset Tetap	2020	20	6.922.405.000	Sudah Alih Status	Nomor BAST 55/BA/Sj/2025 dan BA/308/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 SK Penghapusan Nomor 33/KPTS/Bk.19.4/2025 Tanggal 31 Oktober 2025

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
2	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU di Provinsi Papua Barat Batalyon Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari, Distrik Warmare, Kampung Duwin	Aset Tetap	2020	25	5.581.687.000	Sudah Alih Status	Nomor BAST 55/BA/Sj/2025 dan BA/308/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 SK Penghapusan Nomor 33/KPTS/Bk.19.4/2025 Tanggal 31 Oktober 2025
3	Pembangunan Rumah Khusus Rindam Kodam XVIII Kasuari	Kabupaten Manokwari Selatan, Distrik Momiwaren, Kampung Dembek (Kompleks Rindam XVIII/Kasuari)	Aset Tetap	2021	20	4.898.816.000	Sudah Alih Status	Nomor BAST 55/BA/Sj/2025 dan BA/308/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 SK Penghapusan Nomor 33/KPTS/Bk.19.4/2025 Tanggal 31 Oktober 2025
SUB TOTAL - B						7.402.908.000		
TOTAL (SUB TOTAL A + B)						338.899.729.200		

Sumber: Aplikasi SAKTI Satker PKP Provinsi Papua Barat

Tabel 11. Daftar Aset Rumah Susun Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2025

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
A. RUMAH SUSUN HIBAH								
1	Pembangunan Rumah Susun di Papua Barat I (SNVT-RUSUN17-002)	Kabupaten Sorong (STKIP Muhammadiyah)	Persediaan	2017	1	16.486.398.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 782/BA/Dr/2023 - 098/1.3.AU/J/2023 Tanggal 23 Mei 2023 SK Penghapusan Nomor 14/KPTS/Rb.19.4/2023 Tanggal 26 Mei 2023
2	Pembangunan Rumah Susun di Papua Barat I (SNVT-RUSUN18-011)	Kabupaten Manokwari, Kelurahan Sowi (STT Erikson Tritt Manokwari)	Persediaan	2018	1	12.485.085.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 1465/BA/DR/2022 Tanggal 07 Desember 2022 SK Penghapusan Nomor 39/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 08 Desember 2022

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
3	Pembangunan Rumah Susun di Papua Barat III (SNVT-RUSUN18-013)	Kabupaten Tambrau Distrik Fef (Kompleks Perkantoran)	Persediaan	2018	1	20.251.088.880	Sudah Hibah	Nomor BAST 37/BA/Dr/2022 Tanggal 01 Januari 2022 SK Penghapusan Nomor 13/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 21 Maret 2022
4	Pembangunan Rumah Susun Pemkab Tambrau	Kabupaten Tambrau Distrik Fef (Kompleks Perkantoran)	Persediaan	2020-2021	1	27.094.152.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 51.12/PKS/Sj/2025 dan 600.2/401.b/2025 Tanggal 29 Oktober 2025 SK Penghapusan Nomor 35/KPTS/Bk.19.4/2025 Tanggal 28 November 2025
5	Pembangunan Rumah Susun Ponpes Nurul Yaqin Sorong	Kabupaten Sorong	Persediaan	2020-2021	1	5.252.934.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 1874/BA/Dr/2024 dan 17/BA/Rusun/YINYS/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 SK Penghapusan Nomor 30/KPTS/Rb.19.4/2024 Tanggal 31 Desember 2024
6	Rusun Sekolah Alkitab GPD Kab. Manokwari	Kabupaten Manokwari	Persediaan	2021	1	19.428.009.927	Proses Melengkapi Dokumen Internal dan Eksternal	Dokumen Eksternal yang belum ada yaitu: 1. Kesediaan Menerima Hibah 2. Sertifikat 3. IMB 4. Surat Keterangan Kebenaran FC. Sertifikat / Surat Pernyataan Dalam Proses Pengurusan.
7	Rusun Kab. Tambrau	Kabupaten Tambrau Distrik Fef	Persediaan	2021-2022	1	28.551.982.000	Proses Melengkapi Dokumen Eksternal	Dokumen Eksternal yang belum ada yaitu: 1. Bukti PBG dalam proses pengurusan
8	Rusun Seminari TA.2022	Kabupaten Sorong	Persediaan	2022	1	4.871.630.689	Proses Melengkapi Dokumen Eksternal	Dokumen Eksternal yang belum ada yaitu: 1. Bukti PBG dalam proses pengurusan 1. Kesediaan Menerima Hibah yang tanda tangan Rektor

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
9	Finishing dan PSU Rusun Seminari	Kabupaten Tambrau, Distrik Sausafour, Kampung Nanggaouw	Persediaan	2023	1	103.326.311	Sudah Hibah	Nomor BAST 121/BA/Dr/2020 653/086/2020 Tanggal 28 Juli 2020 SK Penghapusan Nomor 19/KPTS/401688/2020 Tanggal 28 Desember 2020
10	Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong (MYC 2022-2023)	Kota Sorong	Persediaan	2022-2023	1	15.367.684.000	Proses Hibah	Nomor BAST 51.13/PKS/Sj/2025 dan 1101/II.3.AU/O/2025 Tanggal 29 Oktober 2025 SK Penghapusan Nomor 35/KPTS/Bk.19.4/2025 Tanggal 28 November 2025
11	Rusun STT GPI Fakfak (MYC. 2023-2024)	Kabupaten Fakfak	Persediaan	2023-2024	1	13.509.110.000	Proses Hibah	Permohonan Usulan Hibah Ke Sesditjen Nomor PS0403/Rb.19/823 Tanggal 20 Desember 2024
12	Rusun Pondok Pesantren Nurul Yaqin TA.2023 - 2024	Kabupaten Sorong	Persediaan	2023-2024	1	10.194.045.000	Proses Hibah	Permohonan Usulan Hibah Ke Sesditjen Nomor PS0403/Rb.19/823 Tanggal 20 Desember 2024
13	Rusun ASN Pemprov PBD	Kabupaten Sorong	Persediaan	2024-2025	1		Belum Proses Hibah	Nilai Aset Belum di Kapitalisasi
SUB TOTAL - A						173.595.445.807		
B. RUMAH SUSUN ALIH STATUS								
1	Pembangunan Rumah Susun di Papua Barat II (SNVT-RUSUN18-012)	Kota Sorong (Politeknik Kelautan dan Perikanan)	Aset Tetap	2018	1	16.967.400.000	Sudah Alih Status Ke Politeknik Kelautan dan Perikanan Kota Sorong	Nomor BAST 620/BA/Dr/2021 dan 319/Sj.2/PI/780/VIII/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 SK Penghapusan Nomor 12/KPTS/401688/2021 Tanggal 20 September 2021
2	Pembangunan Rumah Susun TNI AL Sorong	Kota Sorong	Aset Tetap	2020-2021	1	24.829.107.000	Sudah Alih Status Ke Kementerian Pertahanan	Nomor BAST 55/BA/Sj/2025 dan BA/308/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
								SK Penghapusan Nomor 33/KPTS/Bk.19.4/2025 Tanggal 31 Oktober 2025
3	Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua Barat	Kabupaten Manokwari	Aset Tetap	2021-2022	1	28.157.650.000	Sudah Alih Status Ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat	Nomor BAST 879/BA/Dr/2024 dan B-445/C/CpL.3/07/2024 Tanggal 19 Juli 2024 SK Penghapusan Nomor 21/KPTS/Rb.19.4/2024 Tanggal 16 Agustus 2024
4	Rusun TNI AL	Kabupaten Sorong	Aset Tetap	2024-2025	1	-	Belum Proses Hibah	Nilai Aset Belum di Kapitalisasi
5	Rusun PUPR	Kota Sorong	Aset Tetap	2024-2025	1	-	Belum Proses Hibah	Nilai Aset Belum di Kapitalisasi
SUB TOTAL - B						69.954.157.000		
TOTAL (SUB TOTAL A + B)						243.549.602.807		

Sumber: Aplikasi SAKTI Satker PKP Provinsi Papua Barat

Tabel 12. Daftar Aset PSU Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2025

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
A. PSU HIBAH								
1	Pembangunan PSU Rumah Khusus di Papua Barat (SNVT-RUSUS 16-110)	Kabupaten Manokwari, Distrik Manokwari Selatan, Kampung Ngiru (Pulau Mansinam)	Persediaan	2016	10	110.000.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 1004/BA/DR/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 SK Penghapusan Nomor 31/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 12 September 2022

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
2		Kabupaten Manokwari, Distrik Manokwari Selatan, Kampung Salobar (Pulau Mansinam)	Persediaan	2016	1	608.827.110	Sudah Hibah	Nomor BAST 1004/BA/DR/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 SK Penghapusan Nomor 31/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 12 September 2022
3		Kabupaten Teluk Bintuni, Distrik Bintuni, Kampung Idut	Persediaan	2016	1	2.083.752.889	Sudah Hibah	Nomor BAST 994/BA/DR/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 SK Penghapusan Nomor 31/KPTS/Rb.19.4/2022 Tanggal 12 September 2022
4	PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Griya Andai	Kabupaten Manokwari, Kelurahan Anday	Persediaan	2021	1	311.200.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 1071/BA/Dr/2023 - 600.2/642 Tanggal 10 April 2023 SK Penghapusan Nomor 17/KPTS/Rb.19.4/2023 Tanggal 09 Juni 2023
5	PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Griya Anday (PSU-22-PB-Kab. MKW)	Kabupaten Manokwari, Kelurahan Anday	Persediaan	2022	1	221.450.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 174/BA/Dr/2024 - 600.2/246 Tanggal 22 Februari 2024 SK Penghapusan Nomor 12/KPTS/Rb.19.4/2024 Tanggal 15 Maret 2024
6	PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Green Valley Residence Manokwari	Kabupaten Manokwari	Persediaan	2023	1	1.009.341.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 952/BA/Dr/2024 dan 600.2/649 Tanggal 31 Juli 2024 SK Penghapusan Nomor 22/KPTS/Rb.19.4/2024 Tanggal 09 September 2024

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
7	PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Sogun Permai 5 Manokwari	Kabupaten Manokwari	Persediaan	2023	1	614.303.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 952/BA/Dr/2024 dan 600.2/649 Tanggal 31 Juli 2024 SK Penghapusan Nomor 22/KPTS/Rb.19.4/2024 Tanggal 09 September 2024
8	PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Arfai Salak Manokwari	Kabupaten Manokwari	Persediaan	2023	1	484.740.000	Sudah Hibah	Nomor BAST 952/BA/Dr/2024 dan 600.2/649 Tanggal 31 Juli 2024 SK Penghapusan Nomor 22/KPTS/Rb.19.4/2024 Tanggal 09 September 2024
9	PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Griya Anday Kab. Manokwari TA.2024	Kabupaten Manokwari	Persediaan	2024	1	471.135.501	Proses Hibah	Permohonan Usulan Hibah Ke Sesditjen Nomor PS0403/Rb.19/824 Tanggal 20 Desember 2024
10	PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Green City Maripi Kab. Manokwari TA.2024	Kabupaten Manokwari	Persediaan	2024	1	870.876.125	Proses Hibah	Permohonan Usulan Hibah Ke Sesditjen Nomor PS0403/Rb.19/824 Tanggal 20 Desember 2024
11	PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Griya Manggoapi Kab. Manokwari TA.2024	Kabupaten Manokwari	Persediaan	2024	1	568.625.374	Proses Hibah	Permohonan Usulan Hibah Ke Sesditjen Nomor PS0403/Rb.19/824 Tanggal 20 Desember 2024
12	PSU Rumah Umum MBR DI Perumahan Fajar Sowi Damai Kab. Manokwari TA. 2025	Kabupaten Manokwari	Persediaan	2025	1	-	Belum Proses Hibah	Nilai Aset Belum di kapitalisasi
SUB TOTAL - A						7.354.250.999		

No	Nama Barang	Lokasi	Akun Neraca	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai BMN (Rp)	Progress	Keterangan
B. PSU ALIH STATUS								
1	PSU Lingkungan Rusus Pabar I (Pegaf)	Kabupaten Pegunungan Arfak, Distrik Anggi, Kampung Ullong	Aset Tetap	2021	1	1.264.224.000	Sudah Alih Status	Nomor BAST 55/BA/Sj/2025 dan BA/308/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 SK Penghapusan Nomor 33/KPTS/Bk.19.4/2025 Tanggal 31 Oktober 2025
2	PSU Lingkungan Rusus Pabar II (Warmare)	Kabupaten Manokwari, Distrik Warmare, Kampung Duwin	Aset Tetap	2021	1	1.025.847.000	Sudah Alih Status	Nomor BAST 55/BA/Sj/2025 dan BA/308/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 SK Penghapusan Nomor 33/KPTS/Bk.19.4/2025 Tanggal 31 Oktober 2025
3	PSU Lingkungan Rusus Rindam Kodam XVIII Kasuari	Kabupaten Manokwari Selatan, Distrik Momiwaren, Kampung Dembek (Kompleks Rindam XVIII/Kasuari)	Aset Tetap	2021	1	1.042.310.000	Sudah Alih Status	Nomor BAST 55/BA/Sj/2025 dan BA/308/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 SK Penghapusan Nomor 33/KPTS/Bk.19.4/2025 Tanggal 31 Oktober 2025
SUB TOTAL - B						3.332.381.000		
TOTAL (SUB TOTAL A + B)						10.686.631.999		

Sumber: Aplikasi SAKTI Satker PKP Provinsi Papua Barat

I.5 Isu Strategis

Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, yang terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 1 (satu) kota. Pada Tahun Anggaran 2025, isu strategis BP3KP Papua II dapat dikelompokkan ke dalam isu eksternal dan isu internal. Isu eksternal antara lain masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Sementara itu, isu internal berkaitan dengan aspek tata kelola organisasi dan kelembagaan di lingkungan BP3KP Papua II. Secara lebih rinci, isu-isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

I.5.1 Isu Eksternal

Isu Eksternal yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya pembentukan Daerah Otonomi Ba.ru (DOB) di wilayah kerja BP3KP Papua II yaitu Provinsi Papua Barat Daya
2. Tingginya angka *backlog* perumahan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
3. Masih tingginya jumlah keluarga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta keberadaan kawasan kumuh, khususnya pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), pulau-pulau kecil, serta kawasan cagar budaya.
4. Kompleksitas aspek legalitas lahan, baik di kawasan perkotaan maupun di wilayah yang didominasi oleh hak ulayat (hak adat).
5. Keterbatasan basis data perumahan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang belum terintegrasi secara menyeluruh.
6. Belum optimalnya regulasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta peran Kelompok Kerja (Pokja) PKP di beberapa daerah.
7. Kondisi topografi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri atas wilayah pesisir laut dan pegunungan, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan konstruksi perumahan.
8. Masih sering terjadinya konflik sosial, seperti pemalangan, yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan perumahan.

9. Penetapan lokasi usulan oleh pengusul yang belum akurat, sehingga terdapat lokasi yang dinyatakan tidak layak akibat keterbatasan atau ketidaksesuaian lahan.
10. Meningkatnya kebutuhan pengawasan dan pengamanan pada lokasi perumahan yang berada di zona merah guna menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan.

I.5.2 Isu Internal

Isu Internal yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya proses serah terima aset, khususnya aset eks Bangrum dan aset yang masih berada dalam tahap pemeliharaan serta optimalisasi, terutama pada aset rumah susun.
2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BP3KP Papua II. Hingga saat ini, jumlah pegawai BP3KP Papua II tercatat sebanyak 54 orang, yang terdiri atas 30 personel pada Satker BP3KP Papua II dan 24 personel pada Satker PKP Provinsi Papua Barat.

I.6 Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Tahunan BP3KP Papua II Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai organisasi sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, seperti Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Isu Strategis, serta Sistematika Laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini memuat perencanaan kinerja balai yang disusun berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan Perjanjian Kinerja beserta kerangka pendanaan dan kronologi perubahannya pada tahun pelaporan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan metode pengukuran kinerja yang digunakan sesuai dokumen perencanaan serta gambaran umum dan timeline pelaksanaan DIPA sebagai dasar pendanaan kegiatan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan analisis akuntabilitas kinerja dan anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja sejak diterimanya DIPA hingga berakhirnya tahun anggaran, yang meliputi upaya peningkatan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi AKIP internal. Selain itu, diuraikan capaian kinerja tahunan dibandingkan dengan target Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, serta analisis perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya. Bab ini juga memuat analisis realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, hasil survei evaluasi manfaat bagi masyarakat, pemanfaatan informasi dalam pelaporan kinerja, serta faktor pendukung keberhasilan dan penyebab tidak tercapainya target kinerja pada setiap sasaran.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan, rekomendasi dan tindak lanjut dalam upaya-upaya untuk meningkatkan capaian Kinerja pada tahun selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

II.1.1 Kondisi Umum

Perumahan merupakan hak dasar setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui penyediaan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, sekaligus memberikan kepastian bermukim. Rumah juga memiliki fungsi sosial yang tinggi dalam membentuk kehidupan masyarakat yang bermartabat, damai, aman, dan nyaman.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah menjamin agar setiap warga negara dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, terorganisasi, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketentuan ini menjadi landasan hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Sejalan dengan amanat tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 menetapkan sasaran utama pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau yang didukung oleh prasarana dan sarana lingkungan yang memadai. Pencapaian sasaran tersebut ditopang oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan kawasan perkotaan yang bebas dari permukiman kumuh.

Pengarusutamaan pembangunan perumahan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan terpadu dalam memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi

mendatang. Pelaksanaannya menuntut keterpaduan tiga pilar utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang diperkuat oleh dimensi kelembagaan. Prinsip pembangunan berkelanjutan tercermin melalui berbagai indikator, antara lain pertumbuhan dan dampak ekonomi makro, tingkat partisipasi masyarakat termasuk kelompok rentan, serta dampak terhadap kualitas lingkungan seperti air, udara, lahan, dan ekosistem. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat harus berlandaskan prinsip keberlanjutan dan memperhatikan daya dukung lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkesinambungan.

Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program. PUG bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan seluruh kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan, lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah, melalui indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan berbagai upaya strategis. Dalam hal ini, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana dan bertanggung jawab sesuai dengan sasaran strategis Kementerian PKP. Seluruh program yang dilaksanakan berorientasi pada peningkatan penyediaan rumah layak huni serta penguatan tata kelola organisasi, khususnya dalam menjawab isu strategis backlog perumahan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pada Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan terpenuhinya seluruh target indikator kinerja utama. Kegiatan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan dan pemeliharaan rumah susun, bantuan PSU untuk rumah MBR, serta berbagai kegiatan verifikasi dan perencanaan teknis berhasil direalisasikan dengan capaian fisik 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan di lapangan. Selain itu,

keberhasilan capaian kinerja juga didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Meskipun terdapat sejumlah kendala seperti faktor cuaca, keterlambatan material, keterbatasan sumber daya manusia, dan dinamika sosial di wilayah pelaksanaan, BP3KP Papua II mampu melakukan langkah mitigasi dan tindak lanjut yang tepat sehingga tidak menghambat pencapaian target secara keseluruhan

Pada aspek penguatan tata kelola, Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan menunjukkan kinerja yang optimal. Layanan sarana dan prasarana internal, dukungan manajemen balai, serta layanan perkantoran seluruhnya mencapai target yang ditetapkan. Di samping itu, penerapan manajemen risiko, pembangunan Zona Integritas, dan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menjadi bukti komitmen BP3KP Papua II dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas.

BP3KP Papua II telah dan terus melakukan berbagai upaya strategis dalam menyediakan hunian yang layak bagi setiap warga negara. Upaya tersebut dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan, antara lain pengembangan regulasi yang bersifat insentif, peningkatan suplai perumahan melalui Program Tiga Juta Rumah, peningkatan kualitas fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penyediaan perumahan dalam berbagai bentuk, meliputi perumahan publik, perumahan komersial, perumahan khusus, dan rumah susun, yang juga didukung melalui pemberdayaan masyarakat.

II.1.2 Potensi dan Permasalahan

Secara umum, tantangan penyelenggaraan pembangunan perumahan di Provinsi Papua Barat terkait dengan karakteristik sosial dan dinamika demografis setempat. Kearifan lokal yang mendorong masyarakat untuk tinggal bersama beberapa kepala keluarga dalam satu rumah berukuran relatif besar namun sederhana, disertai dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, menyebabkan kebutuhan terhadap hunian layak meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan jumlah rumah layak huni yang tersedia, sehingga penyediaan perumahan belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk.

Penyediaan hunian yang memenuhi standar kelayakan memerlukan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Ketimpangan antara pasokan (*supply*)

dan kebutuhan (*demand*) masih menjadi persoalan utama, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kapasitas pengembang yang terbatas serta belum didukung oleh regulasi yang memberikan insentif, ditambah rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR untuk membangun atau membeli rumah, menjadi faktor signifikan penyebab masih banyaknya MBR yang belum dapat menghuni rumah layak. Situasi ini berpotensi menurunkan kualitas permukiman dan memunculkan kawasan kumuh baru. Tantangan semakin kompleks pada wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan dan hambatan dalam proses pengadaan lahan.

Kontribusi BUMN seperti Perumnas dalam pembangunan perumahan untuk MBR juga belum optimal, karena berhadapan dengan persaingan pasar bersama para pengembang. Di sisi lain, lembaga keuangan seperti Bank Papua yang diharapkan menjadi katalis pembiayaan perumahan bagi MBR masih membutuhkan penguatan likuiditas. Selain pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan permukiman perlu lebih diberdayakan agar mampu berperan sebagai investor yang efektif dan motor pengembangan kawasan. BUMN perlu terus didorong untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pemerintah. Sementara itu, masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, perlu diberdayakan secara terorganisir sebagai aktor penting dalam pembangunan perumahan. Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan utama dalam penyediaan perumahan, yaitu:

1. Minimnya ketersediaan data perumahan dan permukiman di daerah.
2. Dukungan kebijakan perumahan dan permukiman yang belum optimal.
3. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan yang belum efektif sehingga belum terjadi sinergi antara program pusat dan daerah.
4. Tidak terintegrasinya infrastruktur perumahan secara menyeluruh.
5. Kontrol pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan yang masih terbatas.
6. Proses perizinan yang belum efisien serta biaya perizinan yang relatif tinggi.
7. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi konstruksi perumahan yang masih perlu ditingkatkan.
8. Keterbatasan lahan, baik di perkotaan maupun daerah yang didominasi Hak Ulayat (Hak Adat).

9. Belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang bersumber dari APBD.
10. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta.
11. Kondisi geografis pegunungan dan kepulauan yang sulit dijangkau, menyebabkan tingginya biaya material dan ketidaksesuaian dengan alokasi anggaran.
12. Alokasi anggaran yang relatif terbatas dibandingkan unit organisasi lain, sementara usulan dari kabupaten/kota sangat banyak.
13. Konflik sosial di daerah dan adanya gerakan radikalisme (Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB) yang sering menghambat pembangunan perumahan.

II.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan BP3KP Papua II

A. Visi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, tidak ditetapkan visi tersendiri, melainkan secara langsung mendukung visi Presiden, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bagian integral dalam mendukung pencapaian visi Presiden periode 2025–2029. Hal ini mencerminkan bahwa proses pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, berlandaskan fondasi yang kuat hasil kepemimpinan sebelumnya, guna mewujudkan Indonesia yang setara dengan negara maju pada tahun 2045 serta mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden menetapkan delapan misi pembangunan nasional (Asta Cita). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mendukung pelaksanaan Asta Cita Nomor 6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, yang selanjutnya diselaraskan sebagai misi Kementerian PKP dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

C. Tujuan

Tujuan BP3KP Papua II pada dasarnya mencakup pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan

kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan pascakerusuhan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. BP3KP Papua II memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tujuan tersebut disusun untuk mendukung pencapaian Visi Presiden Tahun 2025–2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman, Balai berkontribusi terhadap pencapaian enam dari delapan Misi Presiden (Asta Cita), khususnya misi **“Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”**, dengan menitikberatkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, pengurangan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara berkelanjutan.

II.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II sebagai penjabaran dari tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal;
2. Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman;
3. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman;
4. Meningkatnya Perencanaan, Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Pemenuhan Rumah yang terlayani PSU Kawasan Permukiman;
5. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan;
6. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan;

7. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan;
8. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan;
9. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.

II.1.5 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Kerangka Regulasi

Dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Papua II berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan rujukan regulasi yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perumahan, pengembangan kawasan, serta peningkatan kualitas permukiman. Adapun regulasi yang secara langsung berkaitan adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang

Tabel 13. Regulasi Undang-Undang

Nomor	Tahun	Keterangan
UU 1/2011	2011	Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
UU 26/2007	2007	Mengatur penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk penetapan dan delineasi kawasan permukiman.
UU 20/2011	2011	Mengatur penyelenggaraan rumah susun sebagai solusi hunian vertikal, khususnya untuk kawasan perkotaan padat dan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
UU 4/2016	2016	Mengatur Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai instrumen pembiayaan perumahan, khususnya untuk mendukung akses kepemilikan rumah bagi MBR serta keterkaitannya dengan pembangunan permukiman.
UU 23/2014	2014	Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman.
UU	2002	Mengatur penyelenggaraan bangunan gedung agar

Nomor	Tahun	Keterangan
28/2002		memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
UU 6/2023	2023	Mengatur kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan perizinan dan kemudahan investasi, termasuk percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
UU 5/1960	1960	Mengatur pokok-pokok hukum agraria sebagai dasar kepastian hukum hak atas tanah, termasuk legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman.

B. Peraturan Pemerintah (PP)

Tabel 14. Regulasi Peraturan Pemerintah

Nomor	Tahun	Keterangan
PP 14/2016 jo. PP 12/2021	2016/ 2021	Mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk ketentuan operasional terkait Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum (SPU/PSU) serta penanganan kawasan permukiman kumuh.
PP 21/2021	2021	Mengatur penyelenggaraan penataan ruang sebagai landasan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dalam pengembangan kawasan permukiman.
PP 18/2021	2021	Mengatur hak atas tanah rumah susun serta pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan legalitas hunian, khususnya bagi MBR.
PP 13/2021	2021	Mengatur penyelenggaraan rumah susun secara terpadu dengan pengembangan kawasan permukiman guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang dan kualitas hunian.
PP 25/2020	2020	Mengatur penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai mekanisme pembiayaan perumahan yang berkelanjutan.
PP 47/2019	2019	Mengatur peran lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan perumahan, termasuk dukungan pembiayaan mikro untuk peningkatan akses hunian.
PP 64/2016	2016	Mengatur pembangunan perumahan bagi MBR melalui dukungan pembiayaan, penyediaan lahan, serta

Nomor	Tahun	Keterangan
		pemberian kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan.
PP 83/2015	2015	Mengatur peran Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan bagi MBR serta pengembangan kawasan permukiman.
PP 88/2014	2014	Mengatur pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk menjamin keterpaduan, kualitas, dan keberlanjutan hunian.

C. Peraturan Presiden (Perpres)

Tabel 15. Regulasi Peraturan Presiden

Nomor	Tahun	Keterangan
Perpres 191/2024	2024	Mengatur pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai perangkat pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman.
Perpres 139/2024	2024	Mengatur penataan tugas, fungsi, dan struktur organisasi kementerian negara, termasuk pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
Perpres 9/2021	2021	Mengatur pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan sebagai mekanisme koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan perumahan.
Perpres 100/2018	2018	Mengatur penyelenggaraan rumah susun khusus untuk mendukung penyediaan hunian layak di kawasan kumuh, daerah tertinggal, serta wilayah pulau-pulau kecil.

D. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen)

Tabel 16. Regulasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nomor	Tahun	Keterangan
Permen 10/2025	2025	Mengatur bantuan pembangunan perumahan serta penyediaan rumah khusus dalam rangka peningkatan kualitas hunian, termasuk penanganan kawasan kumuh dan percepatan program pembangunan rumah.
Permen 9/2025	2025	Mengatur pemberian kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat

Nomor	Tahun	Keterangan
		Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan akses terhadap hunian layak.
Permen 5/2025 jo. 11/2025	2025	Mengatur kriteria MBR serta persyaratan pemberian kemudahan dalam pembangunan dan/atau perolehan rumah.
Permen 4/2025	2025	Mengatur pengelolaan rumah susun milik dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) guna menjamin tertib pengelolaan hunian vertikal, khususnya di kawasan padat.
Permen 7/2025	2025	Mengatur tata cara pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
Permen 6/2025	2025	Mengatur pedoman pengawasan intern dalam pelaksanaan program dan kegiatan perumahan serta kawasan permukiman.
Permen 3/2025	2025	Mengatur penyelenggaraan pelayanan advokasi hukum terkait legalitas lahan serta penanganan sengketa di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Permen 2/2025	2025	Mengatur pembentukan, harmonisasi, dan evaluasi produk hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk perencanaan strategis dan NSPK.
Permen 1/2025	2025	Mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Permen 1/2024	2024	Mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar struktur kelembagaan sebelum penetapan Permen 1/2025.

E. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal TKPR

Tabel 17. Regulasi SE Direktur Jenderal TKPR

Nomor	Tahun	Keterangan
SE Dirjen TKPR 8/2025	2025	Mengatur tata cara pengendalian penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

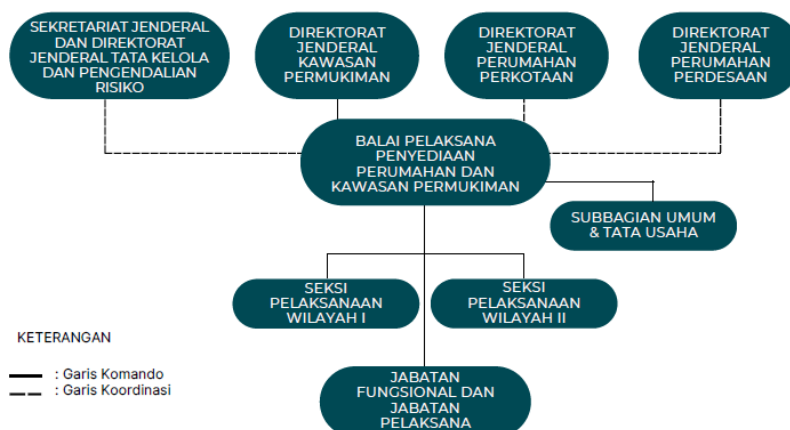
Nomor	Tahun	Keterangan
SE Dirjen TKPR 5/2025	2025	Mengatur tentang petunjuk teknis penyediaan rumah khusus dalam rangka penanganan kawasan kumuh dan pengembangan permukiman khusus.
SE Dirjen TKPR 4/2025	2025	Mengatur tentang pedoman penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
SE Dirjen TKPR 3/2025	2025	Mengatur tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun.
SE Dirjen TKPR 2/2025	2025	Mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pengembangan kawasan permukiman.

F. Keputusan Menteri (Kepmen)

Tabel 18. Regulasi Keputusan Menteri PKP

Nomor	Tahun	Keterangan
Kepmen 23/2025	2025	Menetapkan delineasi kawasan perkotaan, perdesaan, dan pesisir sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Kepmen 03.HK/3015/60 0.10-4849/2024	2024	Menetapkan kebijakan dukungan percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

2. Kerangka Kelembagaan



Gambar 4. Diagram SOTK UPT di Kementerian PKP

Sumber: PermenPKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagaimana ditunjukkan pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di atas, BP3KP memiliki beberapa unit kerja, yaitu Subbagian Umum dan Tata Usaha yang melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan, serta dua seksi teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berperan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP, baik secara teknis maupun administratif, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kedua jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung operasionalisasi tugas sehari-hari, baik di lapangan maupun di kantor, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

II.1.6 Target Kinerja

Target BP3KP Papua II tahun 2025–2029 disusun berdasarkan beberapa skenario pendanaan. Skenario ideal menggambarkan kebutuhan anggaran untuk mencapai 100% target sasaran kegiatan. Skenario ini bersifat optimistis dan digunakan sebagai acuan apabila terjadi keterbatasan pembiayaan pemerintah, khususnya ketika alokasi anggaran tidak memenuhi kebutuhan pendanaan penyediaan perumahan. Penjabaran berikut menyampaikan rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing skenario.

Tabel 19. Skenario Target Kinerja Setiap DIPA BP3KP Papua II

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sekretariat Jenderal						
SK-1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal					
1	Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni					
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SK-2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	500 Unit	2.500 Unit	3.000 Unit	3.500 Unit	4.000 Unit
SK-3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman					
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	68 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
SK-1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan					
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
SK-2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan					
1	Jumlah Unit Rumah Susun Perumahan Perdesaan	132 Unit	-	-	-	-
SK-3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan					
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perdesaan	-	2.500 Unit	2.750 Unit	3.000 Unit	3.250 Unit
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan					
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	Jumlah Unit Rumah Susun Perumahan Perkotaan	-	-	44 Unit	-	44 Unit
SK-3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan					

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	40 Unit	1.000 Unit	1.250 Unit	1.500 Unit	1.750 Unit
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
SK-1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel					
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
SK-2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Tabel di atas menunjukkan rekomendasi distribusi program BP3KP Papua II di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain kapasitas fiskal masing-masing kabupaten/kota, jumlah penduduk miskin, serta proyeksi kebutuhan rumah tangga di tingkat provinsi hingga tahun 2029.

II.1.7 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan oleh BP3KP Papua II, diperlukan dukungan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total indikatif sebesar Rp. 785.069.458.000. Indikasi kebutuhan anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman serta program dukungan manajemen guna mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. Adapun rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk setiap kegiatan diuraikan lebih lanjut dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Tabel 20. Skenario Kerangka Pendanaan Setiap DIPA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI (Rp.)				
		2025	2026	2027	2028	2029
DIPA SEKRETARIAT JENDERAL						
SK-1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal					
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1.659.310.000	1.748.913.000	1.843.354.000	1.942.895.000	2.047.811.000
DIPA DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI (Rp.)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	287.620.000	303.151.000	319.521.000	336.775.000	354.961.000
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000	52.700.000	55.546.000	58.545.000	61.706.000
SK-2 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman						
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	537.535.000	566.562.000	597.156.000	629.402.000	663.390.000
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	17.766.509.000	85.000.000.000	101.250.000.000	117.500.000.000	133.750.000.000
SK-3 Meningkatkan perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman						
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	792.320.000	914.337.000	1.055.145.000	1.217.637.000	1.405.153.000
DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
SK-1 Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	426.890.000	449.942.000	474.239.000	499.848.000	526.840.000
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	203.299.000	234.607.000	270.736.000	312.429.000	360.543.000
SK-2 Meningkatkan ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan						
1	Jumlah Unit Rumah Susun Perumahan Perdesaan	69.672.626.000	-	-	-	-
SK-3 Meningkatkan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perdesaan	-	85.000.000	93.125.000	101.250.000	109.375.000
DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
SK-1 Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	536.646.000	565.625.000	596.169.000	628.362.000	662.294.000
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.150.248.000	1.212.361.000	1.277.828.000	1.346.831.000	1.419.560.000
SK-2 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	271.235.000	285.882.000	301.320.000	317.591.000	334.741.000
2	Jumlah Unit Rumah Susun Perumahan Perkotaan	-	-	51.911.251.000	-	69.131.044.000
SK-3 Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	312.470.000	329.343.000	347.128.000	365.873.000	385.630.000
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	1.269.272.000	31.000.000.000	38.750.000.000	46.500.000.000	54.250.000.000
DIPA DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						
SK-1 Meningkatkan dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	129.233.000	136.212.000	143.567.000	151.320.000	159.491.000
SK-2 Meningkatkan dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	174.233.000	183.642.000	193.559.000	204.011.000	215.028.000

II.2 Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan khusus untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sementara itu, tujuan umum penetapan kinerja adalah:

- sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah;
- sebagai dasar penilaian tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- sebagai tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau sanksi (*reward and punishment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibawah ini merupakan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II Tahun 2025 yang disusun

berdasarkan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Untuk DIPA Sekretariat Jenderal, terdapat perubahan PAGU APBN dari semula sebesar Rp. 1.517.950.000,- menjadi Rp. 1.760.990.000,-.

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Papua II DIPA Sekretariat Jenderal

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Papua II DIPA Sekretariat Jenderal

Untuk DIPA Kawasan Permukiman, terdapat perubahan pagu APBN, dari semula sebesar Rp17.587.220.000,- menjadi Rp19.433.984.000,- sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Selain perubahan pagu anggaran, terdapat pula penyesuaian terhadap target indikator kinerja, yaitu pada indikator jumlah unit Rumah Swadaya yang semula ditetapkan sebanyak 580 unit disesuaikan menjadi 500 unit, serta indikator Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semula 62 unit disesuaikan menjadi 68 unit.

Gambar 7. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYELIDIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPIA II DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kinerja kelompok, lembaga, perusahaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan rumah layak huni	Jumlah Laporan Penanganan, Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Terhadap Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan
2	Meningkatkan ketertarikan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Penanganan, Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Terhadap Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan
3	Meningkatkan pemantauan, fasilitasi pengalihan lahan dan pemenuhan rumah layak huni bagi POK kawasan permukiman	Jumlah Laporan Penanganan, Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Terhadap Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan
KESIMPULAN		Anggaran	
1. Balai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II		Rp	702.781.000
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat		Rp	19.420.984.000
		Rp	19.420.984.000
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELIDIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPIA II	
FITRAH NUR		P. M. DESYARNEDA KILLIAN	

Gambar 8. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Untuk DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, tidak terdapat perubahan pada pagu APBN antara Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi, yaitu tetap sebesar Rp. 70.302.815.000,-. Adapun target indikator kinerja yang ditetapkan pada DIPA tersebut adalah sebanyak 132 unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYELIDIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPIA II DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kinerja kelompok, lembaga, perusahaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan perumahan	Jumlah Laporan Penanganan, Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Terhadap Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan
2	Meningkatkan ketertarikan rumah layak huni di perdesaan	Jumlah Laporan Penanganan, Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Terhadap Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan
KESIMPULAN		Anggaran	
1. Balai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II		Rp	626.890.000
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat		Rp	19.420.984.000
		Rp	70.302.815.000
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELIDIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPIA II	
IMRAN		P. M. DESYARNEDA KILLIAN	

Gambar 9. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYELIDIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPIA II DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kinerja kelompok, lembaga, perusahaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan perumahan	Jumlah Laporan Penanganan, Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Terhadap Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan
2	Meningkatkan ketertarikan rumah layak huni di perdesaan	Jumlah Laporan Penanganan, Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Terhadap Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan
KESIMPULAN		Anggaran	
1. Balai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II		Rp	626.890.000
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat		Rp	19.420.984.000
		Rp	70.302.815.000
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELIDIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPIA II	
IMRAN		P. M. DESYARNEDA KILLIAN	

Gambar 10. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Untuk DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, tidak terdapat perubahan pada pagu APBN antara Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi, yaitu tetap sebesar Rp. 3.539.871.000,-. Adapun target indikator kinerja yang ditetapkan pada DIPA tersebut adalah sebanyak 40 unit Rumah Swadaya di kawasan perkotaan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **P. M. Desyarneda Killian**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selaras sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Agustus 2025

Pihak Pertama

P. M. Desyarneda Killian
NIP. 197912272006052001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Ketercapaian, Ketepatan, Penyelesaian, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan, Rencana dan Program Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan 2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan
2	Meningkatnya Keterwujudan Rumah Bersuara Layak di Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan 2. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan
3	Meningkatnya Penyelidikan Rumah Layak Hasil melalui Penyelidikan Kualitas Penyelenggaraan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan 2. Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan

KENDATAS

- Belai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan Papua Barat

Anggaran
Rp 1.431.262.000
Rp 2.188.000.000
Rp 3.539.871.000

Jakarta, 26 Agustus 2025

DIREKTOR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II

P. M. DESYARNEDA KILLIAN

Gambar 11. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **P. M. Desyarneda Killian**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selaras sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

P. M. Desyarneda Killian
NIP. 197912272006052001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Ketercapaian, Ketepatan, Penyelesaian, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan, Rencana dan Program Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan 2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan
2	Meningkatnya Keterwujudan Rumah Bersuara Layak di Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan 2. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan
3	Meningkatnya Penyelidikan Rumah Layak Hasil melalui Penyelidikan Kualitas Penyelenggaraan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan 2. Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan

KENDATAS

- Belai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan Papua Barat

Anggaran
Rp 1.431.262.000
Rp 2.188.000.000
Rp 3.539.871.000

Jakarta, 20 Oktober 2025

DIREKTOR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II

P. M. DESYARNEDA KILLIAN

Gambar 12. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Untuk DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, tidak terdapat perubahan pada pagu APBN antara Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi, yaitu tetap sebesar Rp. 303.466.000,-.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **P. M. Desyarneda Killian**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ade Andrianingsih**
Jabatan : **Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selaras sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Juli 2025

Pihak Kedua

Ade Andrianingsih
NIP. 77030672

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Ketercapaian, Ketepatan, Penyelesaian, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan, Rencana dan Program Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan 2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan
2	Meningkatnya Keterwujudan Rumah Bersuara Layak di Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan 2. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan
3	Meningkatnya Penyelidikan Rumah Layak Hasil melalui Penyelidikan Kualitas Penyelenggaraan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kelengkapan Penyelenggaraan Penyelidikan Perumahan Perkotaan 2. Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan

KENDATAS

- Belai Pelaksanaan Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

Anggaran
Rp 303.466.000

Jakarta, 15 Juli 2025

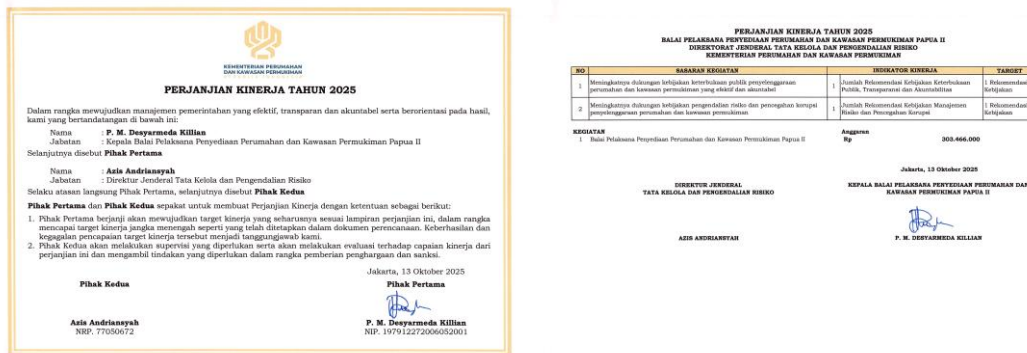
DIREKTOR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

ADE ANDRIANINGSIH

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYELIDIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II

P. M. DESYARNEDA KILLIAN

Gambar 13. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



Gambar 14. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Papua II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

II.3 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja yang diterapkan oleh BP3KP Papua II dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) serta target yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Pengukuran capaian kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) serta realisasi pencapaian kegiatan dan sasaran, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi capaian kinerja digunakan sebagai bahan penilaian dan pembelajaran guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode perencanaan berikutnya. Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Skala Pengukuran Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025

No.	Kondisi	Keterangan
1	kinerja < 30	Sangat Kurang
2	30 < kinerja < 50	Kurang
3	50 < kinerja < 65	Sedang
4	65 < kinerja < 75	Cukup Baik
5	75 < kinerja < 85	Baik

No.	Kondisi	Keterangan
6	Kinerja > 85	Sangat Baik

II.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Selama Tahun Anggaran 2025, alokasi pagu anggaran BP3KP Papua II mengalami beberapa perubahan. Adapun kronologi perubahan anggaran berdasarkan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diuraikan sebagai berikut:

II.4.1 Satker BP3KP Papua II

1. DIPA Sekretariat Jenderal

DIPA Awal Sekretariat Jenderal Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 dengan nomor SP DIPA-146.01.1.691431/2025 ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 981.469.000,-. Selanjutnya, DIPA tersebut mengalami 1 (satu) kali revisi. Adapun rincian perubahan anggaran pada DIPA Sekretariat Jenderal Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 22. DIPA Sekretariat Jenderal Satker BP3KP Papua II Tahun 2025

DIPA Awal : Rp. 981.469.000

Tanggal : 14 Juli 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp.)	
		Semula	Menjadi
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	981.469.000	1.083.149.000
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	981.469.000	1.083.149.000
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	981.469.000	1.083.149.000
7665.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	981.469.000	1.083.149.000
Total		981.469.000	1.083.149.000

Sumber: DIPA Sekretariat Jenderal Satker BP3KP Papua II TA. 2025

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

DIPA Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 dengan nomor SP DIPA-146.03.1.691485/2025 ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 702.761.000,-. DIPA tersebut tidak mengalami revisi pada pagu anggaran. Adapun rincian anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 23. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker BP3KP Papua II Tahun 2025

DIPA Awal : Rp. 702.761.000

Tanggal : 15 Agustus 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp.)	
		Semula	Menjadi
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	702.761.000	702.761.000
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	652.761.000	652.761.000
7659.FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	287.620.000	287.620.000
7659.FAE.001.100	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	287.620.000	287.620.000
7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	365.141.000	365.141.000
7659.FAE.003.100	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	365.141.000	365.141.000
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	50.000.000	50.000.000
7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000	50.000.000
7659.PBF.001.100	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000	50.000.000
Total		702.761.000	702.761.000

Sumber: DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker BP3KP Papua II TA. 2025

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 dengan nomor SP DIPA-146.04.1.691539/2025 ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 426.890.000,-. DIPA tersebut tidak mengalami revisi pada pagu anggaran. Adapun rincian anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 24. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker BP3KP Papua II Tahun 2025

DIPA Awal : Rp. 426.890.000

Tanggal : 14 Juli 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp.)	
		Semula	Menjadi
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	426.890.000	426.890.000
7660.AEA	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	426.890.000	426.890.000
7660.AEA.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	426.890.000	426.890.000
7660.AEA.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	426.890.000	426.890.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp.)	
		Semula	Menjadi
Total		426.890.000	426.890.000

Sumber: DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker BP3KP Papua II TA. 2025

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 dengan nomor SP DIPA-146.05.1.691593/2025 ditetapkan pada tanggal 09 Agustus 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.431.262.000,-. DIPA tersebut tidak mengalami revisi pada pagu anggaran. Adapun rincian anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 25. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker BP3KP Papua II Tahun 2025

DIPA Awal : Rp. 1.431.262.000

Tanggal : 09 Agustus 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp.)	
		Semula	Menjadi
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.431.262.000	1.431.262.000
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1.120.351.000	1.120.351.000
7661.ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	536.646.000	536.646.000
7661.ABF.001.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan dan Strategi, serta Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	536.646.000	536.646.000
7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	271.235.000	271.235.000
7661.ABF.004.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	271.235.000	271.235.000
7661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	312.470.000	312.470.000
7661.ABF.005.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	312.470.000	312.470.000
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	310.911.000	310.911.000
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	310.911.000	310.911.000
7661.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	310.911.000	310.911.000
Total		1.431.262.000	1.431.262.000

Sumber: DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker BP3KP Papua II TA. 2025

5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

DIPA Awal Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 dengan nomor SP DIPA-146.06.1.691613/2025 ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 303.466.000,-. DIPA tersebut tidak mengalami revisi pada pagu anggaran. Adapun rincian anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 26. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker BP3KP Papua II Tahun 2025
DIPA Awal : Rp. 303.466.000
Tanggal : 14 Juli 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp.)	
		Semula	Menjadi
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	303.466.000	303.466.000
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	303.466.000	303.466.000
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	129.233.000	129.233.000
7662.ABF.004.100	Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	129.233.000	129.233.000
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	174.233.000	174.233.000
7662.ABF.005.100	Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko	174.233.000	174.233.000
Total		303.466.000	303.466.000

Sumber: DIPA Direktorat Jenderal TKPR Satker BP3KP Papua II TA. 2025

II.4.2 Satker PKP Papua Barat

1. DIPA Sekretariat Jenderal

DIPA Awal Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025 No. SP DIPA - 146.01.1.691432/2025 ditetapkan pada 14 Juli 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 536.481.000,-. Adapun DIPA tersebut kemudian mengalami revisi sebanyak 1 kali. Rincian perubahan anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 27. DIPA Awal Sekretariat Jenderal – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025
DIPA Awal : Rp. 536.481.000,-
Tanggal : 14 Juli 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	536.481.000
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	-	536.481.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	-	536.481.000
7665.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	536.481.000
TOTAL		-	536.481.000

Sumber: DIPA Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

Pada DIPA Revisi 1 Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025 terdapat perubahan anggaran semula Rp. 536.481.000,- menjadi Rp. 677.841.000,- yakni pada 13 November 2025. Adapun rincian perubahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 28. DIPA Revisi 1 Sekretariat Jenderal – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025
DIPA Revisi 1 : Rp. 677.841.000,-
Tanggal : 13 November 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	536.481.000	677.841.000
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	536.481.000	677.841.000
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	536.481.000	677.841.000
7665.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	536.481.000	677.841.000
TOTAL		536.481.000	677.841.000

Sumber: DIPA Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

DIPA Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025 No. SP DIPA - 146.03.1.691486/2025 ditetapkan pada 15 Agustus 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.884.459.000,- . Adapun DIPA tersebut kemudian mengalami 2 kali revisi yaitu 1 kali revisi anggaran dan 1 kali revisi KPA yang dirincikan sebagai berikut.

Tabel 29. DIPA Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

DIPA Awal : Rp. 16.884.459.000,-

Tanggal : 15 Agustus 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	16.884.459.000
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	-	172.394.000
7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	-	172.394.000
7659.FAE.003.100	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	-	172.394.000
7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	-	16.712.065.000
7659.RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	889.000.000
7659.RBB.001.100	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU	-	45.000.000
7659.RBB.001.101	Pembangunan PSU Perumahan	-	744.000.000
7659.RBB.001.108	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU	-	100.000.000
7659.RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	-	15.823.065.000
7659.RBB.003.101	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	-	14.500.000.000
7659.RBB.003.102	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	-	1.323.065.000
TOTAL		-	16.884.459.000

Sumber: DIPA Dirjen Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

Pada DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025 terdapat perubahan anggaran terkait PSU dan BSPS.

Tabel 30. DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

DIPA Revisi 1 : Rp. 18.731.223.000,-

Tanggal : 02 Oktober 2025 – Perubahan Anggaran

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	16.884.459.000	18.731.223.000
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	172.394.000	172.394.000
7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	172.394.000	172.394.000
7659.FAE.003.100	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	172.394.000	172.394.000
7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	16.712.065.000	18.558.829.000
7659.RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	889.000.000	792.320.000
7659.RBB.001.100	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU	45.000.000	51.000.000
7659.RBB.001.101	Pembangunan PSU Perumahan	744.000.000	627.320.000
7659.RBB.001.108	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU	100.000.000	114.000.000
7659.RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	15.823.065.000	17.766.509.000
7659.RBB.003.101	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	14.500.000.000	16.490.000.000
7659.RBB.003.102	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.323.065.000	1.276.509.000
TOTAL		16.884.459.000	18.731.223.000

Sumber: DIPA Dirjen Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

Pada DIPA Revisi 2 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025 mengalami perubahan KPA pada Rincian Kertas Kerja Satker dengan kode 7659.RBB.003.101 terkait jumlah unit BSPS di Kawasan Permukiman.

Tabel 31. DIPA Revisi 2 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

DIPA Revisi 2 : Rp. 18.731.223.000,-

Tanggal : 12 Oktober 2025 – Perubahan KPA

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	18.731.223.000	18.731.223.000
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	172.394.000	172.394.000
7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	172.394.000	172.394.000
7659.FAE.003.100	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	172.394.000	172.394.000
7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	18.558.829.000	18.558.829.000
7659.RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	792.320.000	792.320.000
7659.RBB.001.100	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU	51.000.000	51.000.000
7659.RBB.001.101	Pembangunan PSU Perumahan	627.320.000	627.320.000
7659.RBB.001.108	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU	114.000.000	114.000.000
7659.RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	17.766.509.000	17.766.509.000
7659.RBB.003.101	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	16.490.000.000	16.490.000.000
7659.RBB.003.102	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.276.509.000	1.276.509.000
TOTAL		18.731.223.000	18.731.223.000

Sumber: DIPA Dirjen Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

Berikut merupakan perbandingan perubahan KPA pada Rincian Kertas Kerja Satker DIPA Revisi 2 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025.

Tabel 32. Perbandingan Perubahan KPA pada DIPA Revisi 2 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

Program/Kegiatan	Harga Satuan	Revisi 1 (Semula)		Revisi 2 (Menjadi)	
		Unit/Paket	Rp	Unit/Paket	Rp
Pelaksanaan BSPS	25.000.000	252	6.300.000.000	234	5.850.000.000
Pelaksanaan BSPS	40.000.000	248	9.920.000.000	266	10.640.000.000
Pelaksanaan BSPS	270.000.000	1	270.000.000	-	-
TOTAL		501	16.490.000.000	500	16.490.000.000

Sumber: DIPA Dirjen Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025 SP DIPA - 146.04.1.691540/2025 ditetapkan pada 21 Agustus 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.875.925.000,- dan mengalami 1 kali revisi sebagai berikut.

Tabel 33. DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

DIPA Awal : Rp. 69.875.925.000,-

Tanggal : 21 Agustus 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	69.875.925.000
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	-	203.299.000
7660.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	203.299.000
7660.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	203.299.000
7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	-	69.672.626.000
7660.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	-	69.672.626.000
7660.RBB.003.101	Pembangunan Rumah Susun Perdesaan dan PSU Pendukungnya	-	65.526.049.000
7660.RBB.003.102	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Perdesaan	-	4.146.577.000
TOTAL		-	69.875.925.000

Sumber: DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

Pada DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025 mengalami perubahan KPA pada halaman III Lampiran DIPA yaitu terkait Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.

Tabel 34. DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

DIPA Revisi 1 : Rp. 69.875.925.000,-

Tanggal : 12 Oktober 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	69.875.925.000	69.875.925.000
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	203.299.000	203.299.000
7660.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	203.299.000	203.299.000
7660.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	203.299.000	203.299.000
7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	69.672.626.000	69.672.626.000
7660.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	69.672.626.000	69.672.626.000
7660.RBB.003.101	Pembangunan Rumah Susun Perdesaan dan PSU Pendukungnya	65.526.049.000	65.526.049.000
7660.RBB.003.102	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Perdesaan	4.146.577.000	4.146.577.000
TOTAL		69.875.925.000	69.875.925.000

Sumber: DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025 SP DIPA - 146.05.1.691594/2025 ditetapkan pada 25 Agustus 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.108.609.000,-. Adapun DIPA tidak mengalami perubahan anggaran, namun mengalami perubahan KPA pada halaman III Rincian Kertas Kerja Satker yang dirincikan sebagai berikut.

Tabel 35. DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

DIPA Awal : Rp. 2.108.609.000,-
Tanggal : 25 Agustus 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	2.108.609.000
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	-	839.337.000
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	839.337.000
7661.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	839.337.000
7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	-	1.269.272.000
7661.RBB.003	Rumah Swadaya Perkotaan	-	1.269.272.000
7661.RBB.003.101	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	-	1.000.000.000
7661.RBB.003.102	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	-	269.272.000
TOTAL		-	2.108.609.000

Sumber: DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

Berikut merupakan DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Tahun 2025.

Tabel 36. DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

DIPA Revisi 1 : Rp. 2.108.609.000,-
Tanggal : 12 Oktober 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2.108.609.000	2.108.609.000
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	839.337.000	839.337.000
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	839.337.000	839.337.000
7661.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan	839.337.000	839.337.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
	Pelaporan Penye-lenggaraan Perumahan Perkotaan		
7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	1.269.272.000	1.269.272.000
7661.RBB.003	Rumah Swadaya Perkotaan	1.269.272.000	1.269.272.000
7661.RBB.003.101	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1.000.000.000	1.000.000.000
7661.RBB.003.102	Pengawasan Pengendalian Pembangu-nan Rumah Swadaya	269.272.000	269.272.000
TOTAL		2.108.609.000	2.108.609.000

Sumber: DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Tahun 2025 mengalami perubahan KPA pada halaman III Rincian Kertas Kerja Satker yang meliputi beberapa kode berikut.

- Kode 521211 terkait Belanja Bahan,
- Kode 522191 terkait Belanja Jasa Lainnya,
- Kode 524111 terkait Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan
- Kode 524114 terkait Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

Berikut merupakan perbandingan perubahan KPA pada Rincian Kertas Kerja Satker DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025.

Tabel 37. Perbandingan Perubahan KPA pada DIPA Revisi 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan – Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan	Awal (Semula)	Revisi 1 (Menjadi)
		Rp	Rp
521211	Belanja Bahan	11.200.000	37.200.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	70.000.000	44.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.926.000	76.522.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67.626.000	43.030.000
Total		200.752.000	200.752.000

Sumber: DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Papua Barat TA. 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

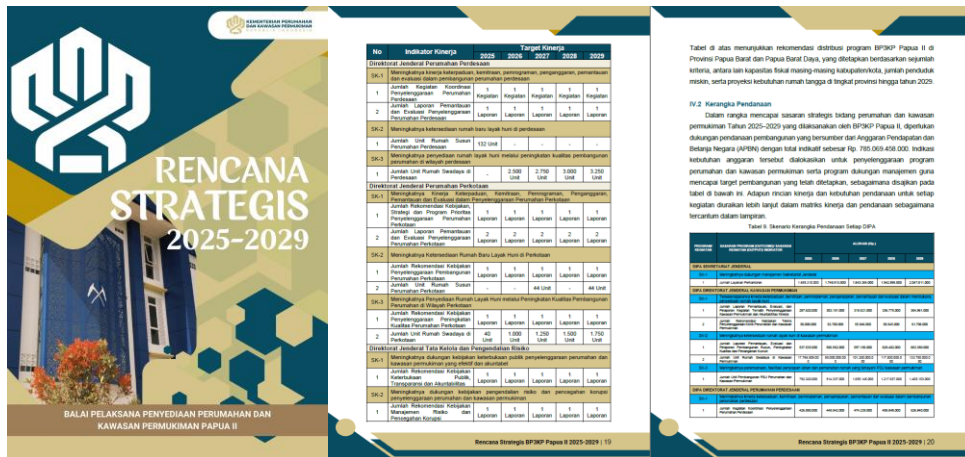
III.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui penguatan seluruh komponen Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Keempat komponen tersebut dilaksanakan secara terintegrasi guna memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, ketepatan pengukuran capaian kinerja, keandalan pelaporan kinerja, serta efektivitas evaluasi internal sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

III.1.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh tersedianya **Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025–2029**. Dokumen perencanaan tersebut disusun sesuai dengan kaidah perencanaan yang baik, dengan berorientasi pada pencapaian hasil melalui penetapan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*). Selain itu, penyusunan perencanaan kinerja telah menerapkan prinsip penyelarasan (*cascading*) sasaran kinerja dari tingkat organisasi hingga level pelaksana secara logis, serta memperhatikan keterkaitan kinerja lintas bidang (*cross-cutting*), sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara terintegrasi.

Selanjutnya, dokumen perencanaan kinerja tidak hanya digunakan sebagai dokumen administratif, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pemanfaatan perencanaan kinerja tersebut bertujuan untuk mewujudkan hasil kinerja yang berkesinambungan, meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh.

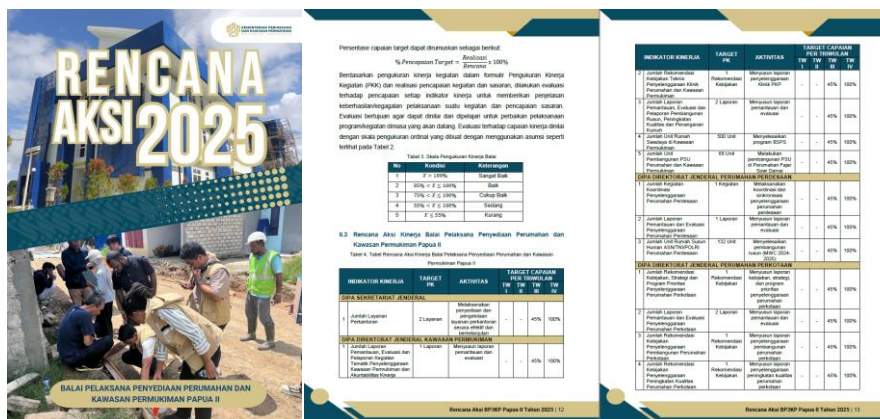


Gambar 15. Rencana Strategis BP3KP Papua II Tahun 2025-2029

III.1.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara sistematis sebagai bagian integral dari penerapan manajemen kinerja organisasi. Proses pengukuran dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja dapat diketahui secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pengukuran kinerja telah menjadi kebijakan yang diterapkan untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja yang efektif dan efisien. Pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan pada setiap tingkat organisasi, sehingga mampu memberikan gambaran ketercapaian kinerja secara menyeluruh serta mendukung pengambilan keputusan manajerial secara tepat dan berbasis kinerja.

Adapun pengukuran kinerja yang dilaksanakan telah dituangkan dalam Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja.



Gambar 16. Rencana Aksi BP3KP Papua II Tahun 2025

III.1.3 Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh tersedianya dokumen laporan yang meliputi **Laporan Triwulan** dan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025**. Penyusunan laporan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta telah mampu menggambarkan kinerja organisasi secara komprehensif.

Dokumen pelaporan kinerja disusun secara sistematis dan memenuhi standar pelaporan yang berlaku, sehingga dapat menyajikan informasi mengenai kualitas pencapaian kinerja, tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan yang telah dan akan dilakukan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, pelaporan kinerja juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyesuaian strategi dan kebijakan organisasi. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan manajerial guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendukung pencapaian kinerja yang lebih optimal pada periode perencanaan berikutnya.



Gambar 17. Laporan Triwulan dan Laporan AKIP BP3KP Papua II Tahun 2025

III.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025 berdasarkan Rencana Aksi Kinerja menunjukkan bahwa realisasi fisik mencapai 93,37% dari target rencana sebesar 100%. Adapun untuk persentase realisasi belum mencapai 100% akibat

adanya pekerjaan fisik BSPS yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target PK	Capaian Target	
			Jumlah	Persentase
SEKRETARIAT JENDERAL				
SK-1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal			
1	Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100%
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni			
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	100%
SK-2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman			
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	500 Unit	500 Unit	63,43%
SK-3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman			
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	68 Unit	68 Unit	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
SK-1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan			
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
SK-2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan			
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	132 Unit	132 Unit	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN				
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Indikator Kinerja		Target PK	Capaian Target	
			Jumlah	Persentase
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100%
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
SK-3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	40 Unit	40 Unit	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN				
SK-1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Laporan	1 Laporan	100%
SK-2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Laporan	1 Laporan	100%

III.3 Analisis Perbandingan Kinerja

Dalam 1 (satu) tahun terakhir, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II mengalami dinamika capaian kegiatan berupa kenaikan dan penurunan kinerja. Adapun capaian terhadap target kinerja Tahun 2025 secara umum berada pada kategori sangat baik. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan kategori penilaian antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, yang disebabkan oleh adanya pemisahan kelembagaan antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pada tahap awal perencanaan, pengelolaan kinerja dan anggaran masih menggunakan 1 (satu) DIPA, sedangkan pada Tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian menjadi 5 (lima) DIPA. Untuk menjaga konsistensi dan mempermudah penyajian informasi dalam analisis perbandingan kinerja BP3KP Papua II, capaian kinerja pada tahun pembanding (tahun sebelumnya) disesuaikan berdasarkan Sasaran Kinerja Tahun 2025.

Tabel 39. Perbandingan Capaian Kinerja Satker BP3KP Papua II Tahun 2024 dan 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO		Tahun 2024						Tahun 2025					
		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)	
		Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi
SEKRETARIAT JENDERAL													
SK-1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal												
1	Jumlah Layanan Perkantoran	3.506.125.000	100	3.495.183.000	99,69	100	100	1.083.149.000	100	945.424.093	87,28	100	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN													
SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni												
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	-	-	-	287.620.000	100	270.718.421	94,12	100	100
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	50.000.000	100	43.264.177	86,53	100	100
SK-2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman												
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	-	-	-	-	-	-	365.141.000	100	363.752.444	99,62	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN													
SK-1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan												
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	-	-	-	-	-	426.890.000	100	383.775.914	89,90	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN													
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan												

Program/Kegiatan/KRO/RO		Tahun 2024						Tahun 2025					
		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)	
		Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	-	-	-	-	-	536.646.000	100	494.392.000	92,13	100	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	-	-	-	-	-	310.911.000	100	306.900.295	98,71	100	100
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan												
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	-	-	-	-	-	-	271.235.000	100	216.963.000	80,0	100	100
SK-3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan												
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	-	-	-	-	-	-	312.470.000	100	218.098.713	69,80	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN													
SK-1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel												
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	-	-	-	-	-	-	129.233.000	100	127.662.407	98,78	100	100
SK-2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman												
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	-	-	-	-	-	-	174.233.000	100	165.708.859	95,11	100	100
Total		3.506.125.000	100	3.495.183.000	100	100	100	3.947.528.000	100	3.536.660.323	89,59	100	100

Tabel 40. Perbandingan Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dan 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Tahun 2024						Tahun 2025					
		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)	
		Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi
SEKRETARIAT JENDERAL													
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal												
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1.052.519.000	100,00	1.029.663.000	97,83	1	1	677.841.000	100,00	562.366.046	82,96	1	1
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN													
SK-1	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyiapan Lahan dan Pemenuhan Rumah yang terlayani PSU Kawasan Permukiman												
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.621.238.000	100,00	2.505.476.000	37,84	600	205	792.320.000	100,00	788.898.297	99,57	68	68
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman												
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2.387.772.000	100,00	2.352.809.000	98,54	1	1	172.394.000	100,00	161.587.477	93,73	1	1
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	28.785.000.000	100,00	28.785.000.000	100,00	5.000	1.062	17.766.509.000	100,00	17.486.902.000	98,43	500	500
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN													
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan.												
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	7.828.071.000	100,00	7.413.080.000	94,70	4	4	203.299.000	100,00	179.262.452	88,18	1	1
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan												
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	165.399.399.000	100,00	92.913.582.000	56,18	396	56	69.672.626.000	100,00	65.161.492.954	99,30	132	132
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN													
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan												
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0,00	1	1	839.337.000	100,00	668.820.409	79,68	1	1

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Tahun 2024						Tahun 2025					
		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)	
		Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.												
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	0	0	0	0,00	0	0	1.269.272.000	100,00	1.266.499.387	99,78	40	40
	TOTAL	212.073.999.000	100,00	134.999.610.000	63,66			91.393.598.000	100,00	86.275.829.022	94,40		

Pada Tabel 40 diatas dan Tabel 41 berikut ini sama-sama menunjukkan perbandingan realisasi capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Papua Barat pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 hanya saja pada Tabel 41 menjelaskan perbandingan jika anggaran Meubelair Rumah Susun DOB Papua Barat Daya tidak dihitung dengan alasan bahwa kegiatan pengadaan tersebut sudah dilakukan pada Tahun Anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran 2024. Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat pada Tahun 2024 – 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung) adalah sebagai berikut.

Tabel 41. Perbandingan Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dan 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung)

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Tahun 2024						Tahun 2025					
		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)	
		Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi
SEKRETARIAT JENDERAL													
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal												
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1.052.519.000	100,00	1.029.663.000	97,83	1	1	677.841.000	100,00	562.366.046	82,96	1	1
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN													
SK-1	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyediaan Lahan dan Pemenuhan Rumah yang terlayani PSU Kawasan Permukiman												
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.621.238.000	100,00	2.505.476.000	37,84	600	205	792.320.000	100,00	788.898.297	99,57	68	68
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman												

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Tahun 2024						Tahun 2025					
		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)		Keuangan (Rp)				Fisik (Laporan/Layanan/Unit)	
		Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Rencana	%	Realisasi	%	Rencana	Realisasi
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2.387.772.000	100,00	2.352.809.000	98,54	1	1	172.394.000	100,00	161.587.477	93,73	1	1
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	28.785.000.000	100,00	28.785.000.000	100,00	5.000	1.062	17.766.509.000	100,00	17.486.902.000	98,43	500	500
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN													
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan.												
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	7.828.071.000	100,00	7.413.080.000	94,70	4	4	203.299.000	100,00	179.262.452	88,18	1	1
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan												
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	165.399.399.000	100,00	92.913.582.000	56,18	396	56	65.827.360.000	100,00	65.340.755.406	99,26	132	132
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN													
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan												
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0,00	1	1	839.337.000	100,00	668.820.409	79,68	1	1
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.												
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	0	0	0	0,00	0	0	1.269.272.000	100,00	1.266.499.387	99,78	40	40
TOTAL		212.073.999.000	100,00	134.999.610.000	63,66			87.345.033.000	100,00	86.275.829.022	98,78		

Berdasarkan kedua tabel tersebut, realisasi capaian kinerja pada kedua tahun anggaran secara umum menunjukkan hasil yang relatif baik, baik dari aspek realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Pada Tahun 2024, sebagian besar kegiatan mampu mencapai target yang telah direncanakan. Namun demikian, pada beberapa kegiatan masih terdapat deviasi antara rencana dan realisasi, yang dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan di lapangan, antara lain pelaksanaan pembangunan Rumah Susun DOB Papua Barat Daya yang dilaksanakan secara multi years contract (MYC) Tahun 2024–2025. Sementara itu, pada Tahun 2025 terlihat adanya perbaikan dan peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan program, yang tercermin dari meningkatnya persentase realisasi keuangan serta capaian output pada sebagian besar indikator kinerja. Perbandingan capaian kinerja tersebut menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Papua Barat dari tahun ke tahun.

III.4 Analisis Realisasi Anggaran

III.4.1 Analisis Realisasi Anggaran Satker BP3KP Papua II

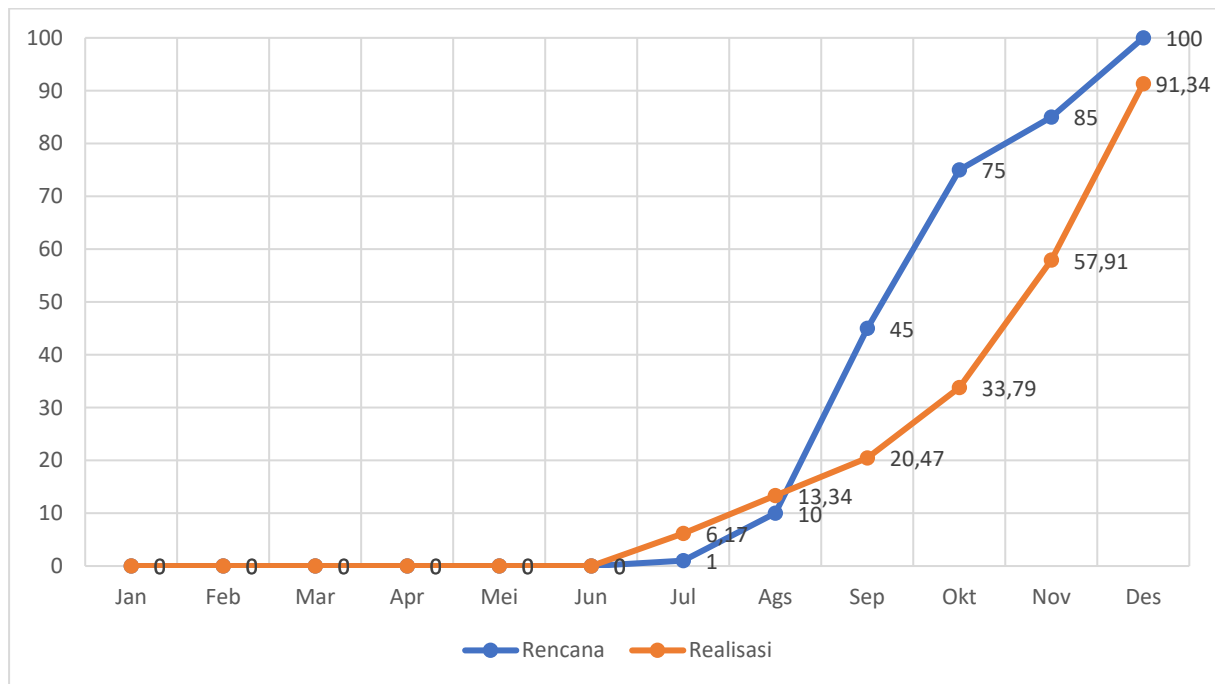
Capaian Target Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2025 BP3KP Papua II berdasarkan Rencana Aksi Kinerja menunjukkan bahwa realisasi keuangan tercapai sebesar 100% dari target rencana 100%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100% dari target rencana 100%.

Tabel 42. Capaian Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)		Anggaran Tidak Terserap (Rp)
			Keu	Fisik	
Sekretariat Jenderal	1.083.149.000	945.424.093	87,28	100	137.724.907
Dirjen Kawasan Permukiman	702.761.000	677.735.042	96,44	100	25.025.958
Dirjen Perumahan Perdesaan	426.890.000	383.775.914	89,90	100	43.114.086
Dirjen Perumahan Perkotaan	1.431.262.000	1.236.354.008	86,38	100	194.907.992
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000	293.371.266	96,67	100	10.094.734
Total	3.947.528.000	3.536.660.323	89,59	100	410.867.677

Berikut disajikan tampilan capaian kinerja realisasi keuangan Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 yang digambarkan melalui kurva S, sebagai alat visual

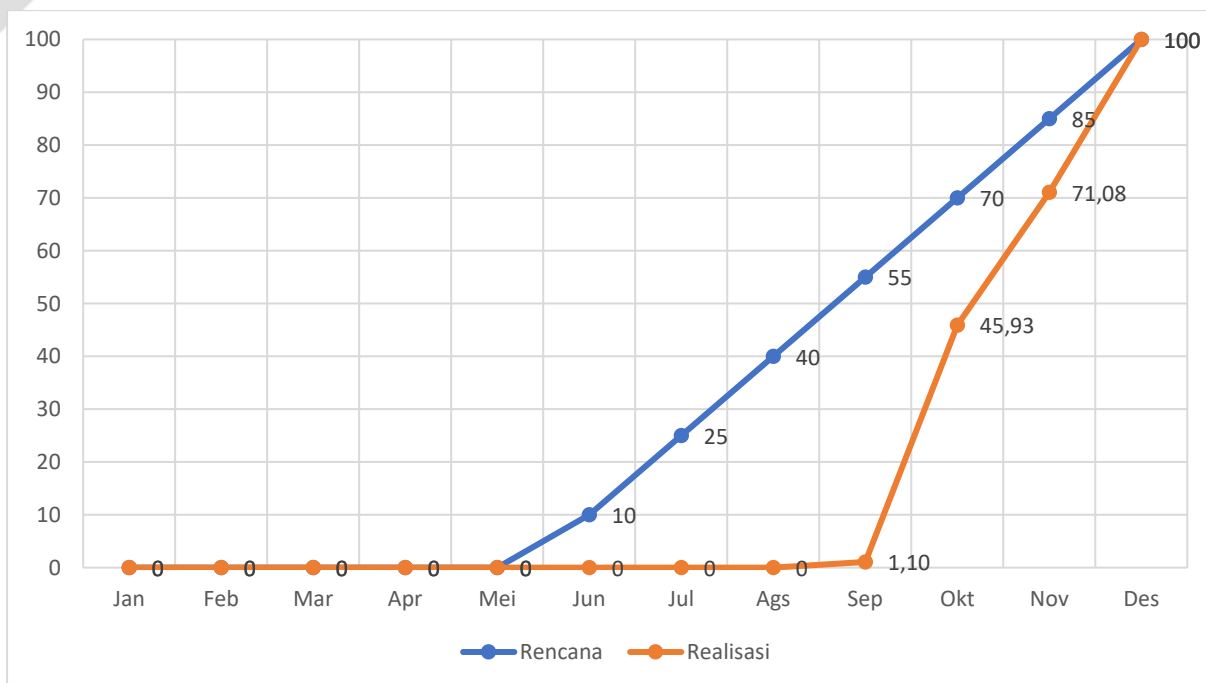
untuk menunjukkan perkembangan dan tingkat ketercapaian realisasi keuangan terhadap target yang telah ditetapkan.



%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Rencana	0	0	0	0	0	0	1	10	45	75	85	100
Realisasi	0	0	0	0	0	0	6,17	13,34	20,47	33,79	57,91	91,34

Gambar 18. Kurva S Keuangan Satker BP3KP Papua II Tahun 2025

Sedangkan untuk capaian kinerja realisasi fisik Satker BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025 yang digambarkan melalui kurva S, sebagai alat visual untuk menunjukkan perkembangan dan tingkat ketercapaian realisasi keuangan terhadap target yang telah ditetapkan.



%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Rencana	0	0	0	0	0	10	25	40	55	70	85	100
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1,10	45,93	71,08	100

Gambar 19. Kurva S Fisik Satker BP3KP Papua II Tahun 2025

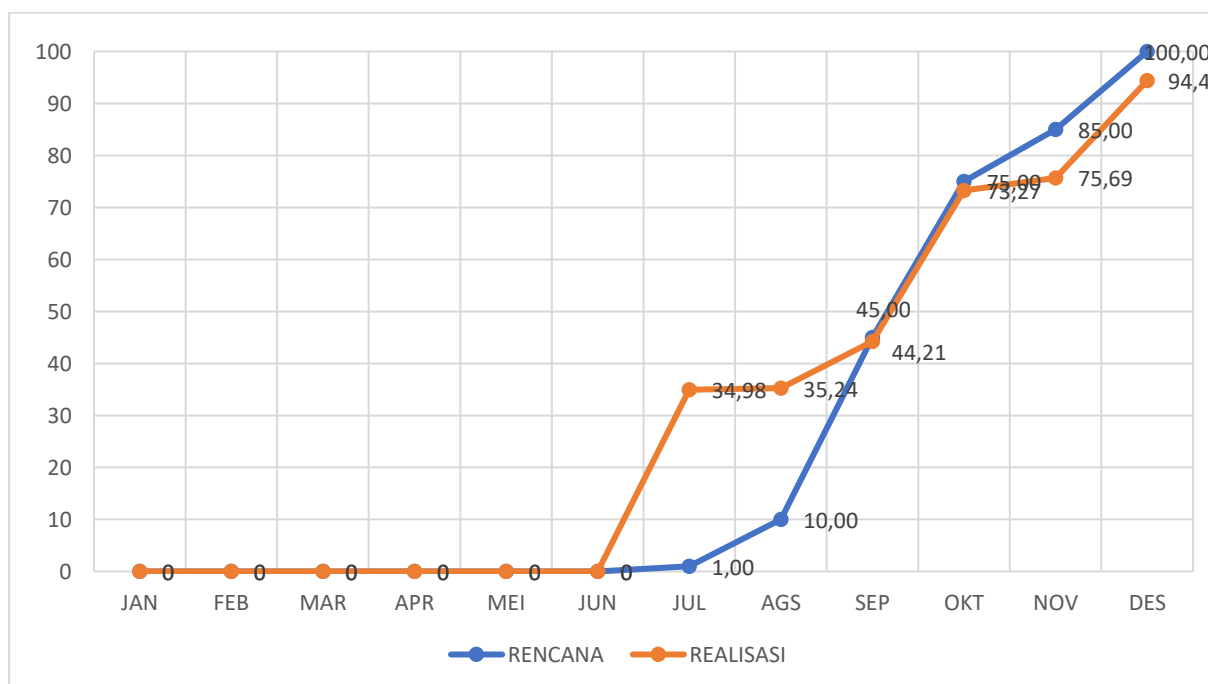
III.4.2 Analisis Realisasi Anggaran Satker PKP Provinsi Papua Barat

Capaian Target Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2025 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat berdasarkan Rencana Aksi Kinerja menunjukkan bahwa realisasi keuangan tercapai sebesar 94,40% dari target rencana 100%, sedangkan realisasi fisik mencapai 93,08% dari target rencana 100%. Adapun pada realisasi keuangan, terdapat anggaran yang tidak terserap, khususnya pada kegiatan pengadaan meubelair Rumah Susun DOB Papua Barat Daya sebesar Rp. 4.048.565.000,-, yang disebabkan karena anggaran tersebut telah dialokasikan dan direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian, total anggaran yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp. 5.117.768.978,-. Sementara itu, realisasi fisik belum mencapai 100% akibat masih terdapat pekerjaan fisik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran berjalan. Realisasi keuangan dan fisik dimaksud secara ringkas disajikan pada Tabel 43, sedangkan rincian lebih lanjut disajikan pada Tabel 46.

Tabel 43. Capaian Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)		Anggaran Tidak Terserap (Rp)
			Keu	Fisik	
Sekretariat Jenderal	677.841.000	562.366.046	82,96	100	115.474.954
Dirjen Kawasan Permukiman	18.731.223.000	18.437.388.591	98,43	66,27	293.835.226
Dirjen Perumahan Perdesaan	69.875.925.000	65.340.755.406	93,51	100	4.535.169.594
Dirjen Perumahan Perkotaan	2.108.609.000	1.935.319.796	91,78	100	173.289.204
Total	91.393.598.000	86.275.829.022	94,4	93,08	5.117.768.978

Berikut tampilan capaian kinerja dengan kurva S untuk capaian keuangan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025.

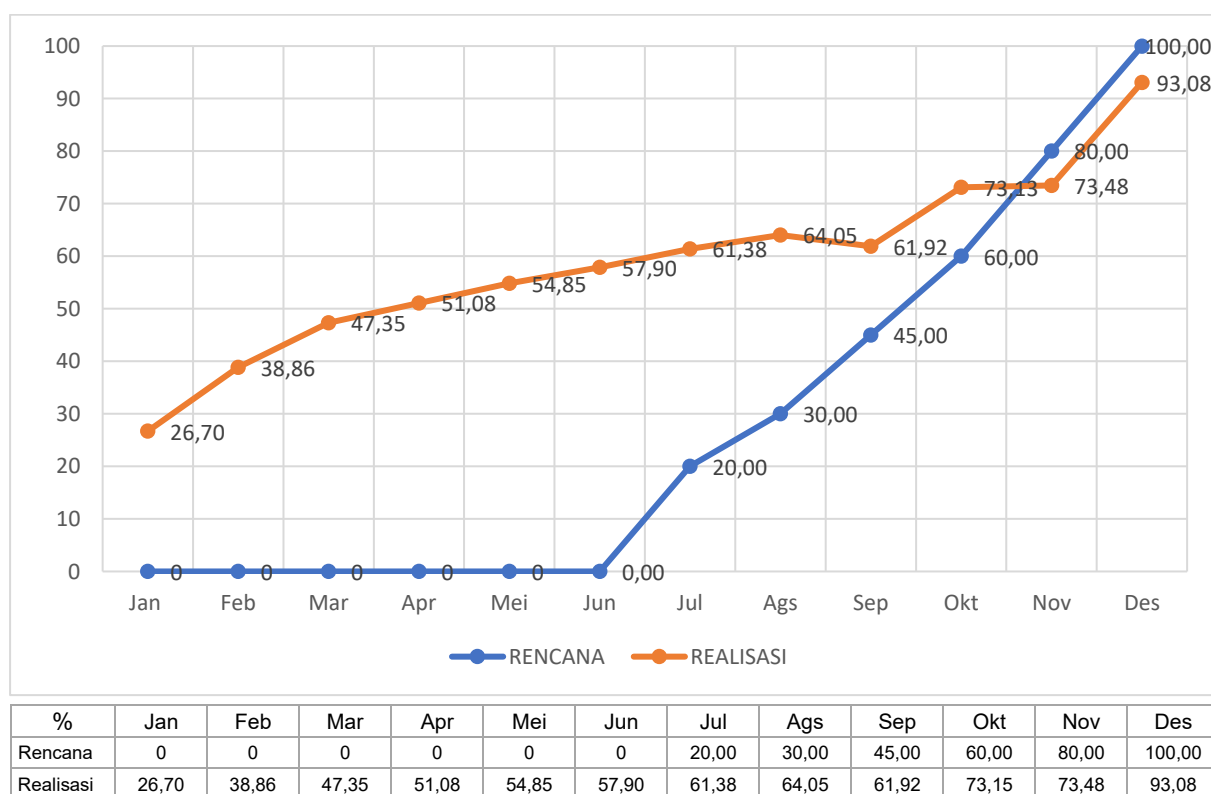


%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Rencana	0	0	0	0	0	0	1,00	10,00	45,00	75,00	85,00	100
Realisasi	0	0	0	0	0	0	34,98	35,24	44,21	73,27	75,69	94,40

Gambar 20. Kurva S Keuangan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

Realisasi fisik di awal tahun 2025 disebabkan adanya lanjutan pekerjaan Rumah Susun DOB Papua Barat Daya dengan *Multi Years Contract* (MYC) yaitu Tahun 2024-2025. Adapun pada kurva fisik terdapat penurunan persentase realisasi di Bulan September dikarenakan adanya adendum penambahan waktu pekerjaan Rumah Susun DOB Papua Barat Daya. Berikut merupakan kurva S untuk capaian fisik Satuan

Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025.



Gambar 21. Kurva S Fisik Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

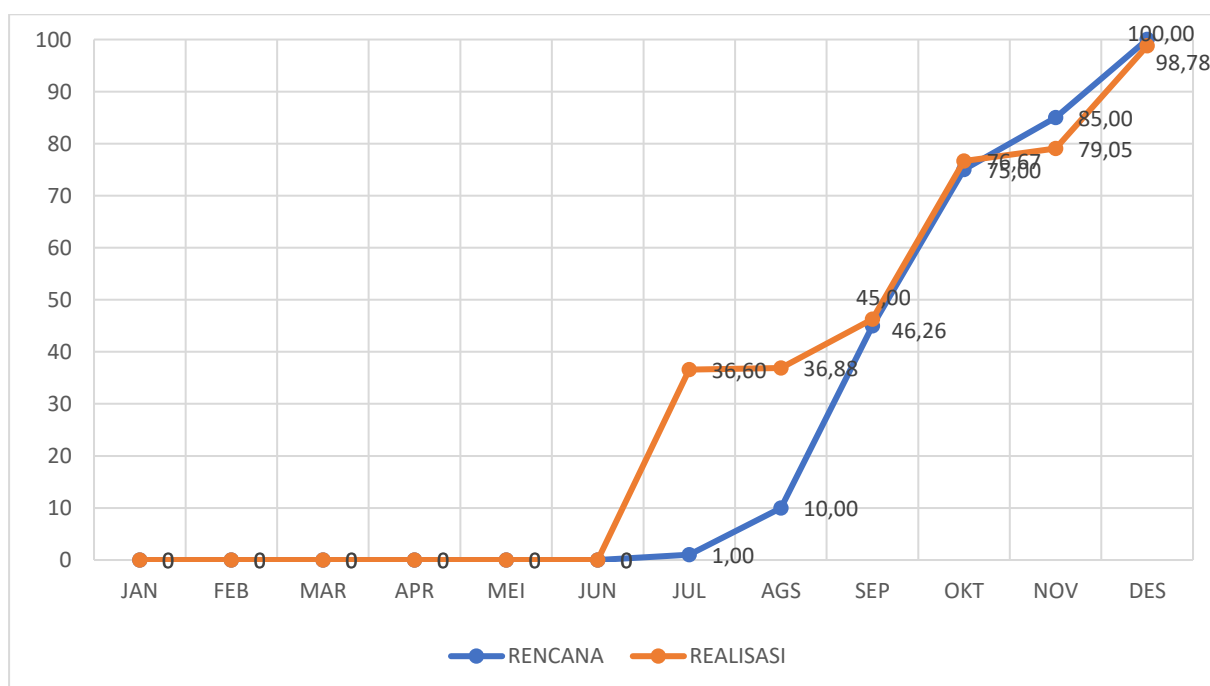
Adapun jika anggaran dan progres fisik meubelair Rumah Susun DOB Papua Barat Daya sebesar Rp. 4.048.565.000,- ditiadakan, maka realisasi keuangan mencapai 98,78% dengan total anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.069.203.978,-. Selain itu, realisasi fisik mencapai 92,77% dari target rencana sebesar 100%. Realisasi anggaran dan fisik dengan ditiadakannya anggaran meubelair **dapat dilihat pada Tabel 44** dan secara rinci **dapat dilihat pada Tabel 47**.

Tabel 44. Capaian Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung)

DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)		Anggaran Tidak Terserap (Rp)
			Keu	Fisik	
Sekretariat Jenderal	677.841.000	562.366.046	82,96	100	115.474.954
Dirjen Kawasan Permukiman	18.731.223.000	18.437.388.591	98,43	66,27	293.835.226
Dirjen Perumahan Perdesaan	65.827.360.000	65.340.755.406	93,51	100	486.604.594

DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)		Anggaran Tidak Terserap (Rp)
			Keu	Fisik	
Dirjen Perumahan Perkotaan	2.108.609.000	1.935.319.796	91,78	100	173.289.204
Total	87.345.033.000	86.275.829.022	98,78	92,77	1.069.203.978

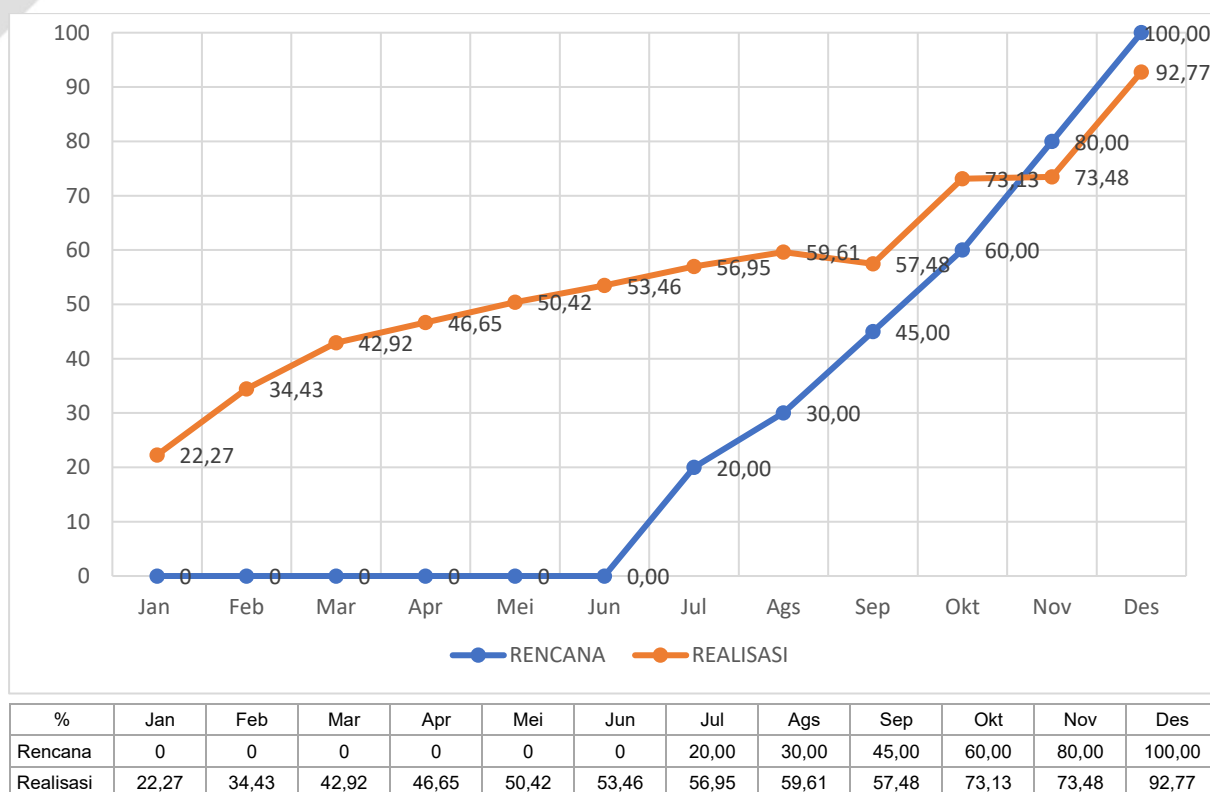
Berikut tampilan capaian kinerja dengan kurva S untuk capaian keuangan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung).



%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Rencana	0	0	0	0	0	0	1,00	10,00	45,00	75,00	85,00	100
Realisasi	0	0	0	0	0	0	36,60	36,88	46,26	76,67	75,69	98,78

Gambar 22. Kurva S Keuangan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung)

Realisasi fisik di awal tahun 2025 disebabkan adanya lanjutan pekerjaan Rumah Susun DOB Papua Barat Daya dengan *Multi Years Contract* (MYC) yaitu Tahun 2024-2025. Adapun pada kurva fisik terdapat penurunan persentase realisasi di Bulan September dikarenakan adanya adendum penambahan waktu pekerjaan Rumah Susun DOB Papua Barat Daya. Berikut merupakan kurva S untuk capaian fisik Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung).



Gambar 23. Kurva S Fisik Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung)

Tabel 45. Capaian Target Kinerja Satker BP3KP Papua II berdasarkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO		Vol	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi	Keuangan (Rp.)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL									
SK-1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal								
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.083.149.000	945.424.093	100	87,28	100	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1	Laporan	287.620.000	270.718.421	100	94,12	100	100
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Laporan	50.000.000	43.264.177	100	86,53	100	100
SK-2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	365.141.000	363.752.444	100	99,62	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN									
SK-1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan								
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Kegiatan	426.890.000	383.775.914	100	89,90	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN									
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								

Program/Kegiatan/KRO/RO		Vol	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi	Keuangan (Rp.)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	536.646.000	494.392.000	100	92,13	100	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	310.911.000	306.900.295	100	98,71	100	100
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	271.235.000	216.963.000	100	79,99	100	100
SK-3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Laporan	312.470.000	218.098.713	100	69,80	100	100
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO									
SK-1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	Laporan	129.233.000	127.662.407	100	98,78	100	100
SK-2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	Laporan	174.233.000	165.708.859	100	95,11	100	100
Total				3.947.528.000	3.536.660.323	100,00	89,59	100,00	100,00

Tabel 46. Capaian Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat berdasarkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Revisi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
							RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL										
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				536.481.000	677.841.000	562.366.046	100,00	82,96	100,00	100,00
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal									
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	536.481.000	677.841.000	562.366.046	100,00	82,96	100,00	100,00
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN										
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				18.731.223.000	18.731.223.000	18.437.387.774	100,00	98,43	100,00	66,27
SK-1	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyediaan Lahan dan Pemenuhan Rumah yang terlayani PSU Kawasan Permukiman									
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	68	Unit	792.320.000	792.320.000	788.898.297	100,00	99,57	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman									
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	172.394.000	172.394.000	161.587.477	100,00	93,73	100,00	100,00
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	500	Unit	17.766.509.000	17.766.509.000	17.486.902.000	100,00	98,43	100,00	64,43
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN										
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				69.875.925.000	69.875.925.000	65.340.755.406	100,00	93,51	100,00	100,00
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan.									
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	203.299.000	203.299.000	179.262.452	100,00	88,18	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan									
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	132	Unit	69.672.626.000	69.672.626.000	65.161.492.954	100,00	93,53	100,00	100,00

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Revisi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
							RN	RL	RN	RL
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN										
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				2.108.609.000	2.108.609.000	1.935.319.796	100,00	91,78	100,00	100,00
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan									
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	839.337.000	839.337.000	668.820.409	100,00	79,68	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.									
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	40	Unit	1.269.272.000	1.269.272.000	1.266.499.387	100,00	99,78	100,00	100,00
TOTAL				91.252.238.000	91.393.598.000	86.275.829.022	100,00	94,40	100,00	93,08

Tabel 47. Capaian Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat berdasarkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 (Jika Meubelair tidak dihitung)

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Revisi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
							RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL										
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				536.481.000	677.841.000	562.366.046	100,00	82,96	100,00	100,00
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal									
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	536.481.000	677.841.000	562.366.046	100,00	82,96	100,00	100,00
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN										
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				18.731.223.000	18.731.223.000	18.437.387.774	100,00	98,43	100,00	66,27
SK-1	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyediaan Lahan dan Pemenuhan Rumah yang terlayani PSU Kawasan Permukiman									
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	68	Unit	792.320.000	792.320.000	788.898.297	100,00	99,57	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman									

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Revisi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
							RN	RL	RN	RL
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	172.394.000	172.394.000	161.587.477	100,00	93,73	100,00	100,00
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	500	Unit	17.766.509.000	17.766.509.000	17.486.902.000	100,00	98,43	100,00	64,43
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN										
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				65.827.360.000	65.827.360.000	65.340.755.406	100,00	99,26	100,00	100,00
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan.									
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	203.299.000	203.299.000	179.262.452	100,00	88,18	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan									
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	132	Unit	65.624.061.000	65.624.061.000	65.161.492.954	100,00	99,30	100,00	100,00
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN										
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				2.108.609.000	2.108.609.000	1.935.319.796	100,00	91,78	100,00	100,00
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan									
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	839.337.000	839.337.000	668.820.409	100,00	79,68	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.									
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	40	Unit	1.269.272.000	1.269.272.000	1.266.499.387	100,00	99,78	100,00	100,00
TOTAL				87.203.673.000	87.345.033.000	86.275.829.022	100,00	98,78	100,00	92,77

III.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.5.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 48. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja/Satker	Pegawai (Orang)			Jumlah
		PNS	PPPK	TA/Outsourcing	
1	Satker BP3KP Papua II	13	14	3	30
2	Satker PKP Provinsi Papua Barat	13	10	2	25
Total					55

Agar beban kerja lebih seimbang antar unit kerja, perlu dilakukan redistribusi jumlah pegawai atau penambahan jumlah pegawai berstatus ASN dan P3K. Adapun permasalahan SDM lainnya adalah sebaran lokasi kegiatan yang berada di 1 kota dan 12 kabupaten memerlukan penambahan jumlah tenaga.

III.5.2 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada BP3KP Papua II terdiri atas peralatan dan mesin sebagaimana telah diuraikan pada Subbab 1.4 Sarana dan Prasarana dalam dokumen ini. Dalam pemanfaatannya, masih terdapat beberapa kendala dan aspek efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan BP3KP Papua II, antara lain sebagai berikut:

1. Hingga saat ini, BP3KP Papua II belum memiliki gedung kantor permanen, sehingga masih menggunakan kantor sewa yang memerlukan perpanjangan kontrak secara berkala setiap tahun.
2. Keterbatasan ketersediaan perangkat komputer notebook/laptop bagi pegawai, sehingga masih terdapat pegawai yang belum didukung oleh perangkat kerja tersebut secara optimal.

Namun demikian, meskipun terdapat beberapa kendala terkait sarana dan prasarana, BP3KP Papua II tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yang tercermin dari capaian kinerja sebesar 100% pada Tahun Anggaran berjalan.

III.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan terdapat rangkaian proses mulai dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaan yang mana monitoring dan evaluasi berperan dalam setiap tahapannya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan secara efektif. Dalam mewujudkan efektivitas, absolut, terkini, akuntabel. Seluruh kegiatan yang diemban oleh BP3KP Papua II perlu adanya alat bantu dalam proses pengerjaan kegiatan tersebut. Berikut adalah pemanfaatan aset serta aplikasi/*website online* yang digunakan untuk membuat (*input*), memperbaharui (*updating*), dan menghasilkan (*outcome*) laporan/informasi kegiatan yang dibutuhkan dan bisa digunakan untuk pertanggungjawaban anggaran, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Aset Intrakomptabel atau Aset Tetap Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam mendukung pencapaian maksud dan tujuan BP3KP Papua II yaitu dukungan sarana dan prasarana baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak cukup banyak, dengan menggunakan hasil pengadaan yang telah dilakukan sejak tahun 2016 - 2025 dimana barang-barang tersebut telah dicatat dalam pencatatatn BMN.
2. Pemanfaatan Teknologi Berbasis Aplikasi/*Website Online*
 - a. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, dan akuntansi berbasis aktual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audit*.
 - b. MyPKP

Aplikasi MyPKP merupakan aplikasi digital resmi yang digunakan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

sebagai portal terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan dan pengelolaan program perumahan.

Secara umum, aplikasi MyPKP berfungsi sebagai:

- 1) **Portal Single Sign-On (SSO)**, MyPKP menjadi pintu masuk tunggal untuk mengakses berbagai aplikasi internal Kementerian PKP tanpa harus melakukan login berulang.
- 2) **Pendukung administrasi dan pelaporan**, digunakan untuk menunjang kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program perumahan dan kawasan permukiman, termasuk pelaporan kinerja dan kegiatan.
- 3) **Peningkatan akuntabilitas dan transparansi**, Setiap aktivitas pengguna tercatat sesuai kewenangan, sehingga mendukung pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program.

Aplikasi MyPKP dalam hal pemantauan dan pelaporan berbasis elektronik (*online*) memungkinkan penyampaian data secara cepat, akurat, dan dapat dipantau secara berkelanjutan. Sistem ini digunakan untuk menilai kualitas serta efektivitas pengendalian pelaksanaan kegiatan, guna memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data My-PKP menjadi bahan pelaporan berjenjang, mulai dari Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II, selanjutnya ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

III.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

III.7.1 Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen berfungsi mendukung perencanaan dan pengendalian penyediaan perumahan sebagai acuan pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Meskipun tidak digunakan sebagai indikator capaian kinerja, program ini mendukung Rencana Strategis BP3KP Papua II.

Tabel 49. Perbandingan Target dan Realisasi Program Dukungan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target PK	Capaian Target	
			Jumlah	Persentase
SEKRETARIAT JENDERAL				
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			
1	Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100%

Berdasarkan tabel diatas, capaian Program Dukungan Manajemen pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal. Indikator Jumlah Layanan Perkantoran pada Sekretariat Jenderal memiliki target sebesar 2 layanan (1 Balai dan 1 Satker) dan telah terealisasi seluruhnya sebanyak 2 layanan, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan manajemen dalam penyelenggaraan perumahan telah terlaksana sesuai dengan rencana dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi balai dan satker. Berikut merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan, permasalahan/penyebab kegagalan pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan, yaitu :

a. Faktor Pendukung

- 1) Penyusunan rangkaian program/kegiatan penyediaan perumahan di tingkat kabupaten/kota/provinsi yang diambil dari kegiatan identifikasi, formulasi dan sinkronisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II;
- 2) Adanya perencanaan alokasi anggaran kegiatan di kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat;
- 3) Dilaksanakannya pemantauan kegiatan yang mengamati perkembangan pelaksanaan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
- 4) Evaluasi rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

b. Permasalahan dan Kendala

- 1) Kegiatan lebih berorientasi pada hasil fisik, keuangan dan siklus program jangka pendek sehingga pendampingan monitoring kurang optimal;

- 2) Terlambatnya data/informasi yang diberikan mengenai progres fisik dan keuangan pada tiap PPK;
- 3) Kurangnya pemantauan dan pelaporan terutama yang berkaitan dengan konsistensi dan akurasi data.

c. Tindak Lanjut

- 1) Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait antara lain Para PPK dan para staf yang terkait;
- 2) Melaksanakan update rutin untuk input di MyPKP;
- 3) Pemantauan melalui kunjungan lapangan (*field visits*);
- 4) Pemantauan melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari laporan dari masing-masing penanggung jawab baik itu yang menangani program/kegiatan utama atau pendukung yang meliputi persentase target dan realisasi serapan dana serta persentase target dan realisasi kemajuan kegiatan.

III.7.2 Program Klinik PKP

BP3KP Papua II menetapkan target jumlah layanan Klinik PKP sebanyak 800 layanan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian layanan yang terealisasi mencapai 850 layanan, yang dilaksanakan baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).



Gambar 24. Dokumentasi Penyelenggaraan Klinik PKP Tahun 2025

Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Program Klinik PKP

Indikator Kinerja		Target PK	Capaian Target	
			Jumlah	Persentase
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni			
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	100%

III.7.3 Program Rumah Susun dan Rumah Khusus

Program Rumah Susun dan Rumah Khusus merupakan bagian strategis dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan rumah susun dan penyediaan rumah khusus bagi kelompok sasaran tertentu, diharapkan dapat menjawab tantangan keterbatasan lahan, kesenjangan kepemilikan rumah, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Adapun Pembangunan Rumah Susun di Tahun 2025 merupakan lanjutan dari Pembangunan Rumah Susun Tahun 2024 (MYC 2024-2025). Rumah susun ini memiliki Tipe Arunika yang terdiri dari 3 tower (Rusun PUPR, Rusun Pemerintah Daerah Papua Barat Daya, dan Rusun TNI AL) yang berjumlah 132 unit.

Data Umum Pembangunan Rusun DOB PBD(MYC 2024-2025)

	Alamat	Distrik Klaurung dan Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
	Tower	1 Tower
	Tipe	Wisma Arunika / 3 lantai
	Unit	44 Unit
		Pelaksana Konstruksi
	Kontraktor Pelaksana	PT. Nindya Karya
	Nilai Kontrak	Rp. 116.942.166.000,-
	Waktu Pelaksanaan	476 HK (4 September 2024 - 23 Desember 2025)
		Manajemen Konstruksi
	Kontraktor Pelaksana	PT. Ciriajasa E.C KSO, PT. Rancang Semesta Nusantara, dan PT. Kencana Rancangtama Konsultan
	Nilai Kontrak	Rp 3.821.500.000
	Waktu Pelaksanaan	426 HK (24 Oktober 2024 - 23 Desember 2025)

Gambar 25. Profil Pembangunan Rumah Susun Tahun 2025

Berikut merupakan tabel profil Program Rumah Susun BP3KP Papua II Tahun 2025.

Tabel 51. Profil Program Rumah Susun BP3KP Papua II Tahun 2025

	Rumah Susun ASN PUPR (MYC 2024-2025)	Rumah Susun ASN Pemprov Papua Barat Daya (MYC 2024-2025)	Rumah Susun TNI AL Sorong (MYC 2024-2025)
Alamat	Jl. Sungai Kamundan, Kel. Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong	Kawasan perkantoran Pemprov PBD, Jl. Sorong Klamono km16, Distrik Klaurung, Kota Sorong	Kawasan TNI AL Pasmar 3, Jl. Sorong Klamono km16, Distrik Klaurung, Kota Sorong
Tower	1 Tower	1 Tower	1 Tower
Tipe	Arunika / 3 lantai	Wisma Arunika / 3 lantai	Arunika / 3 lantai
Unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit
Pelaksana Konstruksi			
Kontraktor Pelaksana	PT. Nindya Karya	PT. Nindya Karya	PT. Nindya Karya
Nilai Kontrak	Rp. 36.712.680.479,-	Rp. 31.489.018.989,-	Rp. 31.471.273.503,-
Waktu Pelaksanaan	476 HK (4 September 2024 - 23 Desember 2025)	476 HK (4 September 2024 - 23 Desember 2025)	476 HK (4 September 2024 - 23 Desember 2025)
Manajemen Konstruksi			
Kontraktor Pelaksana	PT. Ciriayasa E.C KSO, PT. Rancang Semesta Nusantara, dan PT. Kencana Rancangtama Konsultan	PT. Ciriayasa E.C KSO, PT. Rancang Semesta Nusantara, dan PT. Kencana Rancangtama Konsultan	PT. Ciriayasa E.C KSO, PT. Rancang Semesta Nusantara, dan PT. Kencana Rancangtama Konsultan
Nilai Kontrak	Rp 3.821.500.000	Rp 3.821.500.000	Rp 3.821.500.000
Waktu Pelaksanaan	426 HK (24 Oktober 2024 - 23 Desember 2025)	426 HK (24 Oktober 2024 - 23 Desember 2025)	426 HK (24 Oktober 2024 - 23 Desember 2025)

Berdasarkan **Tabel 51**, capaian Program Rumah Susun dan Rumah Khusus pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik sesuai dengan rencana aksi BP3KP Papua II. Indikator Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan memiliki target sebesar 1 Laporan telah terealisasi seluruhnya sebanyak 1 Laporan, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Selain itu, Indikator Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan yang memiliki target sebesar 132 Unit juga telah terealisasi seluruhnya sebanyak 132 Unit, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel 52. Perbandingan Target dan Realisasi Program Rumah Susun dan Rumah Khusus

Indikator Kinerja		Target PK	Capaian Target	
			Jumlah	Persentase
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan.			
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
SK-2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan			
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	132 Unit	132 Unit	100 %

Berikut merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan, permasalahan/penyebab kegagalan pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan, yaitu :

a. Faktor Pendukung

- 1) Hasil Perencanaan dan reviu yang baik oleh BP3KP Papua II dan Satker PKP Provinsi Papua Barat terkait dengan penetapan lokasi pembangunan, alokasi dana, dan hasil Perencanaan Teknis pembangunan rumah susun;
- 2) Pembangunan rumah susun bertingkat untuk mengendalikan lajunya pembangunan rumah-rumah yang banyak memakan lahan (berperan dalam pemanfaatan lahan);
- 3) Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat (melalui BP3KP Papua II dan Satker PKP Provinsi Papua Barat), Penyedia Jasa, seluruh *stakeholder*, dan Masyarakat;
- 4) Ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah susun;
- 5) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan rumah susun; dan
- 6) Adanya *monitoring* dan evaluasi yang efektif sehingga capaian kinerja dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

b. Permasalahan dan Kendala

- 1) Intensitas hujan yang tinggi hampir setiap hari mengakibatkan pekerjaan kawasan seperti pekerjaan rigid, *paving block*, kanstin dan tanaman menjadi tidak maksimal; dan
- 2) Dana mebelair tidak terserap dikarenakan sudah dilakukan penyerapan di tahun anggaran sebelumnya.

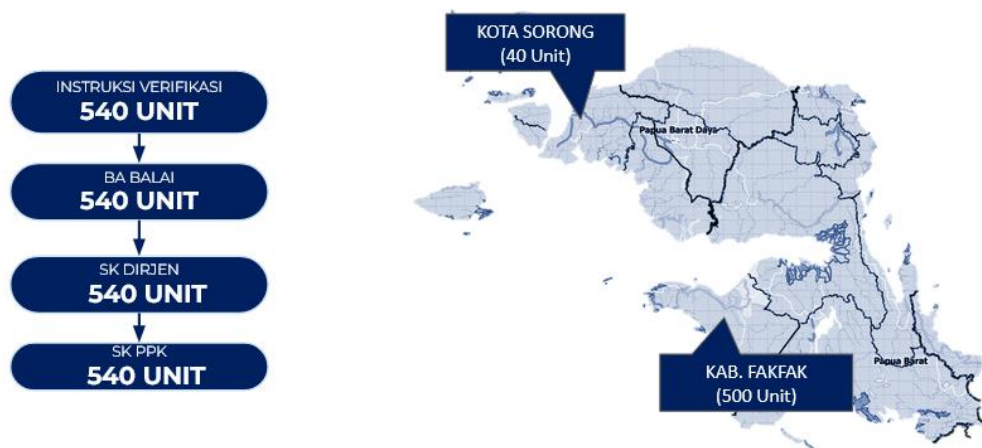
c. Tindak Lanjut

- 1) Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah.

III.7.4 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Tahun 2025 terdapat pada Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak. Adapun kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan dengan mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat.

Sebaran Penetapan CPB BSPS 2025 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya



Gambar 26. Sebaran Lokasi BSPS Tahun 2025

Berdasarkan **Tabel 53**, capaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Tahun 2025 di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan Indikator Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh yang memiliki target sebesar 2 Laporan telah terealisasi seluruhnya sebanyak 2 Laporan, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Selain itu, Indikator Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang memiliki target sebesar 500 Unit juga telah terealisasi seluruhnya sebanyak 500 Unit, namun untuk tingkat capaian kinerjanya masih mencapai 64,43% dikarenakan pekerjaan fisik masih belum selesai hingga tahun anggaran berakhir.

Sedangkan untuk capaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Tahun 2025 di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menunjukkan hasil yang sangat baik sesuai dengan rencana BP3KP Papua II. Indikator Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan memiliki target sebesar 2 Laporan telah terealisasi seluruhnya sebanyak 2 Laporan, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Selain itu, Indikator Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan yang memiliki target sebesar 40 Unit juga telah terealisasi seluruhnya sebanyak 40 Unit, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel 53. Perbandingan Target dan Realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target PK	Capaian Target	
			Jumlah	Persentase
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman			
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	500 Unit	500 Unit	64,43%
DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN				
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100%
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.			
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	40 Unit	40 Unit	100%

Berikut merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan, permasalahan/penyebab kegagalan pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan, yaitu:

a. Faktor Pendukung

- 1) Tersedianya dukungan dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka rumah tidak layak huni di wilayah masing-masing;
- 2) Terwujudnya pelaksanaan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah melalui perhatian dan dukungan yang berkelanjutan; dan

- 3) Adanya alokasi dan ketersediaan anggaran pemerintah yang memadai untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

b. Permasalahan dan Kendala

- 1) Terdapat 1 Penerima Bantuan tanah bersengketa dan mundur di Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- 2) Lokasi yang berada di pulau-pulau kecil menghambat pelaksanaan sosialisasi, terdapat pergantian Calon Penerima Bantuan sebanyak 1 orang;
- 3) Terdapat penurunan nilai upah tukang pada wilayah Daratan/Perkotaan dari SEMULA senilai Rp. 5.000.000-, MENJADI senilai Rp. 3.500.000-. Hal ini berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS, mengingat volume pekerjaan bertambah sementara upah tukangnyanya justru menurun;
- 4) Fasilitator berdasarkan juknis diperkenankan operasionalnya/transportasi disesuaikan dengan kategori wilayah namun anggaran sudah terbatas/dikunci. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan di kalangan fasilitator yang ditugaskan di wilayah kepulauan dan perkotaan;
- 5) Potensi kelangkaan kayu serta beberapa bahan bangunan pada akhir tahun; dan
- 6) Pekerjaan berpotensi tidak selesai di akhir tahun anggaran 2025.

c. Tindak Lanjut

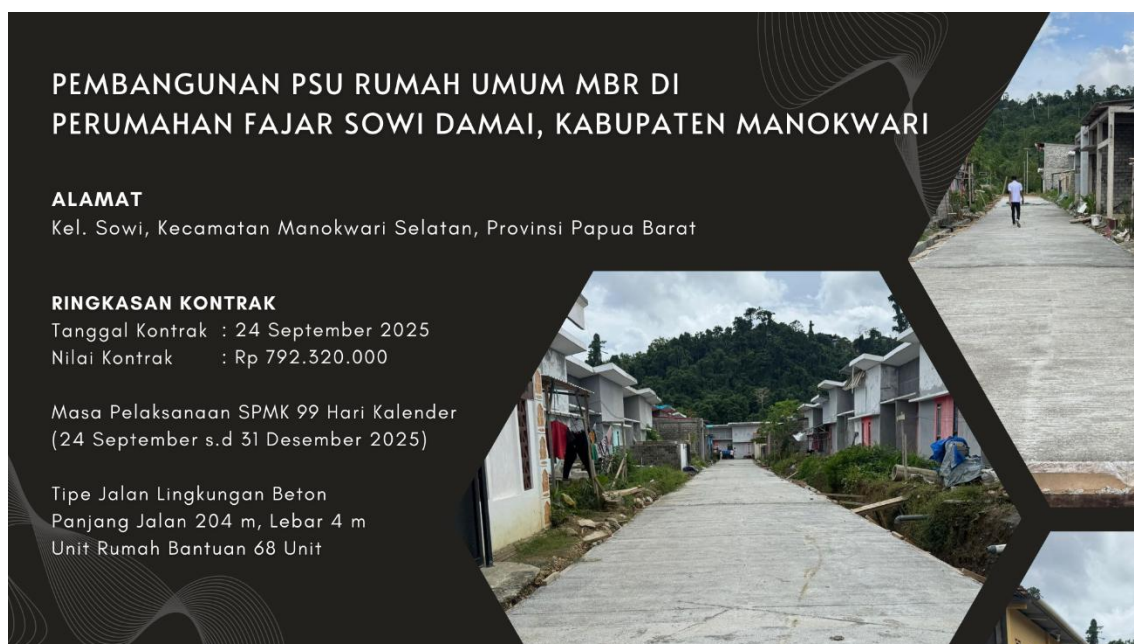
- 1) Surat usulan perubahan dan pergantian telah disampaikan ke Pusat, menunggu Instruksi Verifikasi;
- 2) Mengajukan pergeseran anggaran untuk wasdal, Penggantian CPB dan penyusunan Surat Penetapan CPB Tahap IV;
- 3) Melakukan proses komunikasi dan koordinasi kepada para pihak khususnya pemerintah kampung untuk dapat membantu upah tukang;
- 4) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah, melalui usulan tambahan operasional bagi fasilitator di wilayah kepulauan;
- 5) Melakukan proses percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan dan tahapan program melalui wasdal Tim Rumah Swadaya, Satker dan Balai serta Surat Kabalai BP3KP Papua II kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVI Kabupaten Fakfak Perihal Dukungan Penyediaan Kayu pada Program BSPS di Kabupaten Fakfak; dan

Berdasarkan Surat Ditjen TKPR No. RU 1003-Dt/206 Tahun 2025 poin d dan e, dalam hal PB tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik sampai dengan akhir TA. 2025, maka

PB diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan maksimal 60 hari setelah Tahun Anggaran 2025 berakhir.

III.7.5 Program Bantuan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Bantuan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Tahun 2025 terdapat di Perumahan Fajar Sowi Damai, Kabupaten Manokwari. Adapun kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pekerjaan ini berlokasi di Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, dengan fokus pada pembangunan jalan lingkungan beton sepanjang 204 meter dan lebar 4 meter guna meningkatkan aksesibilitas kawasan perumahan.



Gambar 27. Profil Kegiatan Bantuan Pembangunan PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Fajar Sowi Damai

Adapun capaian Program Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Fasilitas Umum (PSU) pada Tahun 2025 di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menunjukkan hasil yang sangat baik sesuai dengan rencana BP3KP Papua II. Hal tersebut ditandai dengan indikator Jumlah Unit Pembangunan PSU memiliki target sebesar 68 Unit telah terealisasi seluruhnya sebanyak 68 Unit, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel 54. Perbandingan Target dan Realisasi Program Bantuan Pembangunan PSU Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target PK	Capaian Target	
			Jumlah	Persentase
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
SK-3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman			
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	68 Unit	68 Unit	100%

Berikut merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan, permasalahan/penyebab kegagalan pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan, yaitu:

a. Faktor Pendukung

- 1) Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan para pihak terkait, termasuk Pengembang Perumahan, BP3KP Papua II, dan Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan optimal;
- 2) Dilaksanakannya monitoring secara berkala untuk memastikan proses pengerjaan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- 3) Dukungan ketersediaan sumber daya, baik tenaga kerja maupun material, yang memadai sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis.

b. Permasalahan dan Kendala

- 1) Intensitas hujan mengakibatkan pekerjaan tidak maksimal sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

c. Tindak Lanjut

- 1) Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah;
- 2) Dilakukan Adendum penambahan waktu hingga 31 Desember 2025.

Selain dari keempat program dan kegiatan tersebut, terdapat beberapa faktor lain pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan pelaksanaan kinerja BP3KP Papua Ilyaitu sebagai berikut.

1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan

Penyusunan Rencana Tahunan Penyediaan Perumahan, diharapkan dengan kegiatan ini tersusunnya Rencana Kerja Tahunan BP3KP Papua II yang selaras dengan kebijakan nasional, prioritas nasional, dan isu-isu strategis daerah yang

mengakomodasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PKP di kawasan, antar kawasan, dan antar Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

2. Peningkatan Sinergitas Kelembagaan dalam Penyediaan Perumahan

Kegiatan Peningkatan Sinergitas Kelembagaan dalam Penyediaan Perumahan diselenggarakan sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud kesamaan persepsi, sinkronisasi program, serta optimalisasi peran masing-masing lembaga, sehingga sinergitas kelembagaan dalam penyediaan perumahan dapat ditingkatkan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Pelaksanaan Verifikasi Teknis

Pelaksanaan Verifikasi Teknis yang dilakukan sebelum pembangunan fisik kegiatan penyediaan rumah susun, rumah swadaya, dan rumah khusus, Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPN, serta Fasilitas Layanan Bantuan PSU yaitu dengan menilai kelayakan lokasi siap bangun. Dengan terlaksananya Verifikasi Teknis secara baik, maka akan menambah keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan dan adanya antisipasi hambatan atau permasalahan baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya.

4. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran yang sedang berjalan Kegiatan Wasdal dilakukan untuk menunjang agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara tepat waktu, mutu dan biaya.

5. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi yaitu kegiatan pengamatan secara langsung dan dilakukan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk mengawal kegiatan agar tetap sesuai jadwal dan target, serta dapat dijadikan Langkah deteksi dini apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Kegiatan ini berupa pengumpulan data realisasi kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja. Monev bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai bahan evaluasi agar kegiatan selanjutnya dapat lebih berdayaguna dan berhasil-guna.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II pada Tahun Anggaran 2025 berada pada kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian target realisasi keuangan dan fisik Satuan Kerja BP3KP Papua II dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat berdasarkan Rencana Aksi Kinerja, yang menunjukkan bahwa realisasi keuangan mencapai 94,20% dari target rencana 100,00%, sedangkan realisasi fisik mencapai 93,37% dari target rencana 100%.

Secara rinci, realisasi keuangan Satker BP3KP Papua II tercatat sebesar Rp. 3.536.660.323,- dari pagu anggaran Rp. 3.947.528.000,-, atau mencapai 89,59%, sementara realisasi fisik telah mencapai 100%. Selanjutnya, pada Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat, apabila anggaran dan progres fisik kegiatan pengadaan meubelair Rumah Susun DOB Papua Barat Daya sebesar Rp. 4.048.565.000,- tidak diperhitungkan, maka realisasi keuangan mencapai 98,78%, dengan total anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.069.203.978,-. Adapun realisasi fisik pada satuan kerja tersebut mencapai 92,77% dari target rencana 100%.

Adapun capaian hasil, faktor-faktor penunjang keberhasilan, maupun permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan, diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Hasil
 - a. Terwujudnya hunian yang layak dan aman;
 - b. Terwujudnya rumah susun;
 - c. Terwujudnya peningkatan kualitas rumah warga/ masyarakat sebanyak 500 unit;
 - d. Terwujudnya akses jalan lingkungan bagi masyarakat penghuni rumah subsidi;
 - e. Terwujudnya bangunan hunian bertingkat yang layak.
2. Faktor Penunjang Keberhasilan
 - a. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan para pihak terkait, termasuk Pengembang Perumahan, BP3KP Papua II, dan Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan optimal;

- b. Penyusunan rangkaian program/kegiatan penyediaan perumahan di tingkat kabupaten/kota/provinsi yang diambil dari kegiatan identifikasi, formulasi dan sinkronisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II;
 - c. Dilaksanakannya pemantauan kegiatan yang mengamati perkembangan pelaksanaan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
 - d. Dukungan ketersediaan sumber daya, baik tenaga kerja maupun material, yang memadai sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis.
3. Permasalahan/ Kendala
- a. Intensitas hujan mengakibatkan pekerjaan tidak maksimal sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 - b. Terdapat 1 Penerima Bantuan tanah bersengketa dan mundur di Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak.
 - c. Lokasi yang berada di pulau-pulau kecil menghambat pelaksanaan sosialisasi, terdapat pergantian Calon Penerima Bantuan sebanyak 1 orang.
 - d. Terdapat penurunan nilai upah tukang pada wilayah Daratan/ Perkotaan dari SEMULA senilai Rp. 5.000.000-, MENJADI senilai Rp. 3.500.000-. Hal ini berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS, mengingat volume pekerjaan bertambah sementara upah tukangnyanya justru menurun.
 - e. Fasilitator berdasarkan juknis diperkenankan operasionalnya/ transportasi disesuaikan dengan kategori wilayah namun anggaran sudah terbatas/dikunci. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan di kalangan fasilitator yang ditugaskan di wilayah kepulauan dan perkotaan.
 - f. Potensi kelangkaan kayu serta beberapa bahan bangunan pada akhir tahun.
 - g. Pekerjaan berpotensi tidak selesai di akhir tahun anggaran 2025.

IV.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan agar kendala yang dihadapi tahun ini tidak terulang pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sebagai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja, sebagai pembahasan berkala internal tim.
2. Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah.
3. Melakukan usulan perubahan dan pergantian ke Pusat dan menunggu Instruksi Verifikasi.
4. Mengajukan pergeseran anggaran untuk pengawasan dan pengendalian.
5. Melakukan proses komunikasi dan koordinasi kepada para pihak khususnya pemerintah kampung (desa) untuk dapat membantu upah tukang.
6. Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah, melalui usulan tambahan operasional bagi fasilitator di wilayah kepulauan.
7. Melakukan proses percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan dan tahapan program melalui wasdal Tim Rumah Swadaya, Satker dan Balai serta Surat Kepala BP3KP Papua II kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVI Kabupaten Fakfak Perihal Dukungan Penyediaan Kayu pada Program BSPS di Kabupaten Fakfak.
8. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap paket-paket kegiatan dengan lebih intensif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai jadwal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendataan Program 3 Juta Rumah dan Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Perkotaan Provinsi Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan TA. 2025



Dokumentasi Klinik PKP



Dokumentasi Rumah Susun



Koordinasi terkait Pembangunan Rumah Susun DOB (Rusun ASN PUPR, Rusun ASN Pemprov Papua Barat Daya, dan Rusun TNI AL)



Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun DOB (Rusun ASN PUPR, Rusun ASN Pemprov Papua Barat Daya, dan Rusun TNI AL)



Rusun ASN PUPR



Rusun ASN Pemprov Papua Barat Daya



Rusun TNI AL

Dokumentasi BSPS



Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA. 2025



Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA. 2025

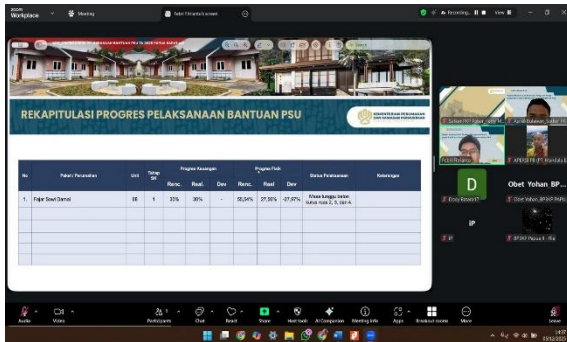
Dokumentasi PSU



Penandatanganan Kontrak Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Umum MBR di Perumahan Fajar Sowi Damai dengan PT. Mandala Eka Putra



Survey Lokasi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Umum MBR di Perumahan Fajar Sowi Damai



Pelaksanaan koordinasi terkait Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Umum MBR di Perumahan Fajar Sowi Damai



Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Umum MBR di Perumahan Fajar Sowi Damai



Sebelum
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Umum MBR
di Perumahan Fajar Sowi Damai

Sesudah



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II

2025